



**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC*
*SOCIAL REPORTING (ISR)***

**(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* Tahun
2011-2015)**

SKRIPSI

Oleh :

**Nindya Tyas Hasanah
130810301083**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC*
*SOCIAL REPORTING (ISR)***

**(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* Tahun
2011-2015)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

**Nindya Tyas Hasanah
130810301083**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tak terhenti saya panjatkan kepada Allah SWT atas semua karunia dan hidayahNya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini sebagai baktiku kepada:

1. Ibunda Sri Hartatik dan Ayahanda Sumarto yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan dukungan serta doa yang selama ini mengiringi setiap langkah keberhasilanku;
2. Kakakku Fuad Handitya dan Ika Kurniawati tercinta serta seluruh keluarga besar yang selama ini selalu memberi *support*.
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi yang telah mmeberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh rasa sabar.
4. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Al-Insyirah: 5-8)

“Allah has perfect timing; never early, never late. It takes a little patience and a lot of faith, but it is worth the wait.”

(Tumblr)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindya Tyas Hasanah

NIM : 130810301083

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI *JAKARTA ISLAMIC INDEX* TAHUN 2011-2015)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Maret 2017

Yang menyatakan,

Nindya Tyas Hasanah

NIM 130810301083

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* Tahun 2011-2015)

Nama Mahasiswa : Nindya Tyas Hasanah

NIM : 130810301083

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 24 Oktober 2016

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Novi Wulandari W, SE., M.Acc&Fin

NIP.19801127 200501 2003

Drs. Sudarno, M.Si., Ak

NIP.19601225 198902 1001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA

NIP. 19640809 199003 2 001

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC*
*SOCIAL REPORTING (ISR)***

**(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* Tahun
2011-2015)**

Oleh

Nindya Tyas Hasanah
130810301083

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Novi Wulandari, SE., M.Acc&Fin., Ak
Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sudarno, M.Si., Ak

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC
SOCIAL REPORTING (ISR)*
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR
DI *JAKARTA ISLAMIC INDEX* TAHUN 2011-2015)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nindya Tyas Hasanah
NIM : 130810301083
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

3 April 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Wasito, M.Si., Ak (.....)
NIP. 19600103 199103 1001
Sekretaris : Taufik Kurrohman, SE., M.SA., Ak (.....)
NIP. 19820723 200501 1002
Anggota : Dra. Ririn Irmadaryani, M.Si., Ak (.....)
NIP. 19670102 199203 2002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

FOTO
4 x 6

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak
NIP. 19710727 199512 1001

Nindya Tyas Hasanah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* selama periode tahun 2011-2015. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 perusahaan. Pengungkapan ISR dilakukan dengan cara analisis konten melalui metode *skoring* dari laporan tahunan perusahaan. Analisa data dilakukan dengan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda, uji *Adjusted R²*, uji F, dan uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Kata kunci : *Islamic Social Reporting* (ISR), Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas

Nindya Tyas Hasanah

*Department of Accountancy, Faculty of Economics and Business,
Univeristy of Jember*

ABSTRACT

This study aims to analyze of good corporate governance and financial performance influences to disclosure Islamic Social Reporting (ISR). Islamic Social Reporting (ISR) is a social responsibility disclosure index accordance to the sharia principles. Populations in this study are all companies that listed in Jakarta Islamic Index exchange in 2011-2015. The sampling method in this tudy is puposive sampling. The total number of samples in this study were 55 research samples. The disclosure of ISR is obtained by content analysis through scoring method from corporate annual reports. The analytical techniques was conducted by descriptif statistic and classical assumption test and also hypothesis was tested using multiple liniear regression method, Adjusted R^2 test, F test and t test. The analysis showed that audit committee size, liquidity and profitability significantly affect the disclosure of ISR. Meanwhile, commissioners board size and leverage does not affect the disclosure of ISR.

Keywords : *Islamic Social Reporting (ISR), Commissioners Board Size, Audit Committee Size, Liquidity, Leverage, Profitability*

RINGKASAN

Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* Tahun 2011-2015); Nindya Tyas Hasanah, 130810301083; 2017; 141 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pasar modal telah menjadi *financial nerve-centre* (pusat saraf finansial) dunia ekonomi modern (Muhammad, 2008:70). Keberadaan pasar modal yang tangguh, berdaya saing global, dan terorganisir dengan baik juga turut membantu usaha pembangunan perekonomian nasional. Dalam rangka mendukung terwujudnya pasar modal selaku subsistem dari perekonomian nasional Indonesia, kini industri pasar modal Indonesia mulai melirik pengembangan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam untuk dijadikan alternatif instrumen investasi.

Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia dan diharapkan menjadi suatu market yang sangat besar bagi pengembangan industri keuangan syariah. Perkembangan pasar modal syariah Indonesia dimulai ketika diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Danareksa Investment pada tahun 1997. Dalam rangka memandu investor yang ingin berinvestasi secara syariah, selanjutnya Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan *Jakarta Islamic Index (JII)* pada tahun 2000 dan menambah instrumen investasi syariah berupa obligasi syariah mudharabah serta sukuk korporasi pada tahun 2002. Perusahaan yang terdaftar di JII sudah bisa dipastikan mempunyai aktivitas operasional bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan perusahaan yang masuk di JII telah melalui proses seleksi ketat dari pihak BAPEPAM-LK dan BEI, dimana hanya perusahaan dengan kriteria tertentu yang bisa lolos seleksi penilaian.

Upaya perbaikan dan peningkatan aktivitas dalam memaksimalkan laba diperlukan perusahaan supaya memperoleh dukungan publik yang cukup besar atas

kelangsungan usahanya. Peningkatan aktivitas tersebut dapat diwujudkan oleh pihak manajemen melalui pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan baik secara internal maupun eksternal kepada *stakeholders*. Saat ini, konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai berkembang di bidang ekonomi yang berbasis syariah, tidak hanya di bidang ekonomi konvensional saja. CSR yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam ini dikenal dengan istilah *Islamic Social Reporting* (ISR).

Pelaporan tanggung jawab sosial pada institusi keuangan syariah hingga saat ini masih belum seragam dikarenakan tidak adanya standar secara baku yang mengatur pelaporan tentang CSR perusahaan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pengukuran CSR dalam perspektif syariah dengan menggunakan Indeks GRI kurang tepat digunakan karena belum menggambarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam, dimana belum mengungkapkan terbebasnya pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dari unsur *riba*, *gharar*, dan transaksi-transaksi lainnya yang diharamkan dalam Islam. Menanggapi kondisi tersebut, akhirnya AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) membuat Indeks ISR sebagai tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah, selanjutnya peneliti lainnya mengembangkan tentang item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh entitas Islam (Othman et al, 2009). Pembuatan indeks ISR diharapkan dapat memudahkan entitas syariah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sosialnya karena didalamnya terdapat konsep unik dimana mencerminkan nilai-nilai Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadits.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Setiap komponen ISR diukur secara dikotomi (*dischotomous procedure*), jika perusahaan mengungkapkan 1 komponen ISR nilainya adalah 1 dan apabila komponen tersebut tidak diungkapkan nilainya adalah 0. Ukuran komite audit dan ukuran dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris dan komite audit perusahaan yang disebutkan dalam

laporan tahunan (*annual report*). Likuiditas diukur dengan *Current Ratio* (CR), *Leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), dan profitabilitas diukur dengan *Return on Asset* (ROA).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah entitas syariah dari berbagai sektor usaha yang terdaftar pada *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2011-2015. Berdasarkan data yang diperoleh dari JII terdapat 63 perusahaan yang terdaftar selama tahun 2011 hingga tahun 2015. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil dari uji asumsi klasik memberikan hasil bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi normal, tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Hasil dari uji statistik F memperoleh hasil bahwa variabel independen Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Likuiditas, *Leverage*, dan Profitabilitas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil uji statistik t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) sedangkan ukuran komite audit, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Alwan Kustono, M.Si., Ak., CPA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
4. Ibu Novi Wulandari, SE., M.Acc&Fin., Ak., selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Drs. Sudarno, M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mmeberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Septarina Prita DS, SE., M.SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen akuntansi beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Kedua orang tuaku, ayah dan ibuku tercinta Sumarto dan Sri Hartatik yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah mencurahkan cinta, kasih sayang, dukungan, doa kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
8. Kakakku Fuad Handitya dan Ika Kurniawati tersayang yang selalu memberikan dukungan;

9. Sahabat-sahabat terbaikku dari masa TK hingga SMA, Madaniya Hiya Efendi, Andry Yovi Saputra, Akromatul Wafiroh, Tristya Fera Widyati, Paradina Sukma Guna Sarika, Vida Arima Putri, Yeti Karlina, dan Dessy Figan. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan keceriaan yang telah diberikan sampai saat ini. Kalian luar biasa. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat;
10. Keluarga Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember periode 2014/2015 dan 2015/2016, terima kasih atas semua waktu dan pengalamannya selama ini, meskipun terkadang terjadi konflik, semua tetap dapat berjalan dengan lancar karena kita berada di dalam satu keluarga;
11. Teman terbaikku Yuani Putrihandani, Pradista Mugi Dirgantari, Yuladzul Fitrohtil Huda Firdaus, Emyranti Pristiyana, Nurul Fitriyah dan Annisa Aulia Rahmanti selama menempuh studi di Jember yang senantiasa menemaniku dan memberikan dukungan dari semester pertama menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
12. Teman seperjuangan Akuntansi 2013, terima kasih atas kerjasamanya selama ini;
13. Bunda Dewi dan teman-teman kos Jawa II No. 31, Mbak Galdhis, Mbak Risha, Mbak Nona, Ella, Denny, Dinda, Elsa, dan Titis. Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan yang selalu ada pada diri manusia. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 29 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13

2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 <i>Shariah Enterprise Theory</i>	13
2.1.2 Teori Legitimasi.....	14
2.1.3 Teori Agensi	16
2.1.4 Teori <i>Stakeholders</i>	18
2.1.5 Pengungkapan (<i>Disclosure</i>).....	19
2.1.6 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	22
2.1.6.1 Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Islam	23
2.1.7 <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).....	25
2.1.8 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	37
2.1.8.1 Definisi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	37
2.1.8.2 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	38
2.1.8.3 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	40
2.1.8.4 Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	40
2.1.8.5 Dewan Komisaris.....	41
2.1.8.6 Komite Audit	42
2.1.9 Kinerja Keuangan	43
2.1.9.1 Rasio Likuiditas	45
2.1.9.2 Rasio <i>Leverage</i>	46
2.1.9.3 Rasio Profitabilitas	48
2.1.10 <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII).....	49
2.2 Penelitian Terdahulu	52
2.3 Kerangka Pemikiran	56
2.4 Pengembangan Hipotesis	57
2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	58
2.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	59

2.4.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	60
2.4.4 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	62
2.4.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	63
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	64
3.1 Jenis Penelitian.....	64
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	64
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	64
3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukurannya.....	66
3.4.1 Variabel Terikat atau <i>Dependent Variable</i>	66
3.4.2 Variabel Tidak Terikat atau <i>Independent Variable</i>	67
3.5 Metode Analisis Data.....	70
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	70
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	71
3.5.2.1 Uji Normalitas Data	71
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas	71
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	72
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	73
3.5.3 Pengujian Hipotesis	74
3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	74
3.5.3.2 Uji <i>Adjusted R²</i> (Koefisien Determinasi).....	74
3.5.3.3 Uji Statistik F.....	75
3.5.3.4 Uji Statistik t.....	75
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah	76
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	79
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	79
4.1.1 Proses Pemilihan Sampel.....	79

4.1.2 Analisa Data.....	81
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	90
4.3 Uji Asumsi Klasik	93
4.3.1 Uji Normalitas Data	93
4.3.2 Uji Multikolinieritas	94
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	95
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	96
4.4 Pengujian Hipotesis	96
4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	96
4.4.2 Uji <i>Adjusted R²</i> (Koefisien Determinasi).....	98
4.4.3 Uji Statistik F.....	99
4.4.4 Uji Statistik t.....	100
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	102
4.5.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	102
4.5.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	103
4.5.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	104
4.5.4 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	106
4.5.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	107
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	109
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Keterbatasan	110
5.3 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	119

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perkembangan Saham Syariah	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	56
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	77
Gambar 4.1 Skor Indeks ISR di <i>Jakarta Islamic Index</i> Tahun 2011-2015.	85



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar Saham Syariah .4
Tabel 2.1	Prinsip Etika dan Konten dalam <i>Islamic Social Reporting</i>28
Tabel 2.2	Hasil Penelitian Terdahulu52
Tabel 4.1	Proses Pengambilan Sampel.....79
Tabel 4.2	Kode Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian80
Tabel 4.3	Total Skor Indeks ISR Periode 2011-201582
Tabel 4.4	Daftar Perusahaan dengan Skor Indeks ISR Tertinggi dan Terendah Tahun 2011-201584
Tabel 4.5	Skor Indeks ISR Masing-masing Tema di <i>Jakarta Islamic Index</i> Tahun 2011-201586
Tabel 4.6	Hasil Analisis Statistik Deskriptif90
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas data93
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinieritas.....94
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....95
Tabel 4.10	Hasil Uji Autokorelasi96
Tabel 4.11	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda97
Tabel 4.12	Hasil Uji <i>Adjusted R²</i> (Koefisien Determinasi)98
Tabel 4.13	Hasil Uji Statistik F99
Tabel 4.14	Hasil Uji Statistik t100

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Indeks <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	119
Lampiran 2. Skor Indeks ISR Perusahaan Sampel Tahun 2011-2015	128
Lampiran 3. Rangkuman Data Penelitian	132
Lampiran 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	134
Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Klasik	135
1. Uji Normalitas Data	135
2. Uji Multikolinieritas	135
3. Uji Heteroskedastisitas	136
4. Uji Autokorelasi	136
Lampiran 6. Analisis Regresi Linier Berganda	137
Lampiran 7. Hasil Pengujian Hipotesis	138
1. Uji Adjusted R ² (Koefisien Determinasi)	138
2. Uji Statistik F	138
3. Uji Statistik t	138
Lampiran 8. <i>Durbin Watson</i> (DW) Tabel	139
Lampiran 9. F Tabel	140
Lampiran 10. t Tabel	141

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia industri yang semakin modern saat ini menuntut perusahaan untuk terus berupaya mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dari segi produksi dan konsumsi barang maupun jasa serta kebutuhan investasi. Pasar modal sebagai sarana investasi yang menjanjikan mulai menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Pasar modal juga telah menjadi *financial nerve-centre* (pusat saraf finansial) dunia ekonomi modern (Muhammad, 2008:70). Keberadaan pasar modal yang tangguh, berdaya saing global, dan terorganisir dengan baik juga turut membantu usaha pembangunan perekonomian nasional. Dalam rangka mendukung terwujudnya pasar modal selaku subsistem dari perekonomian nasional Indonesia, kini industri pasar modal Indonesia mulai melirik pengembangan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam untuk dijadikan alternatif instrumen investasi.

Sejak awal tahun 1990, Malaysia mulai mengembangkan kegiatan pasar modal syariahnya dan mulai saat itu pasar modal syariah di Malaysia terus mengalami kemajuan yang pesat dan dapat dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di dunia (Tim Studi Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia: 2004). Bertolak belakang dengan pengembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia yang tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kemajuan kegiatan investasi yang telah dicapai sektor perbankan. Anggraini (2015) menyatakan bahwa dibutuhkan suatu pelaporan yang baik berkaitan dengan informasi kesyariahan perusahaan dalam upaya meningkatkan pangsa pasar entitas syariah, karena investor tidak hanya mempertimbangkan informasi laporan keuangan saja dalam keputusan investasinya. Minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi di pasar modal berbasis syariah menjadi salah satu sorotan penting bagi tim studi investasi syariah dalam mengatasi berbagai kendala berkembangnya pasar modal syariah Indonesia,

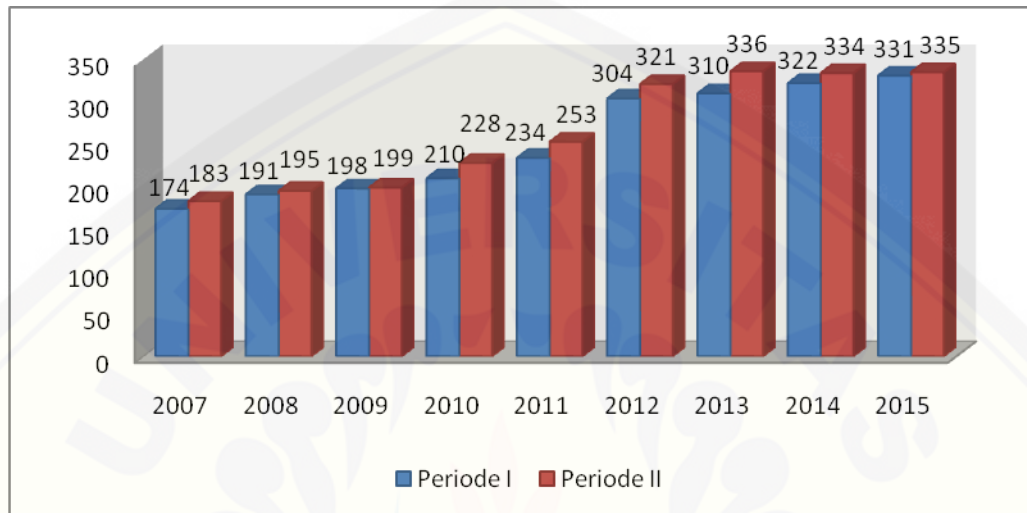
mengingat bahwa Indonesia juga perlu memperhatikan dan menarik minat investor mancanegara potensial terutama yang berasal dari negara-negara Timur Tengah untuk menanamkan dananya pada pasar modal syariah Indonesia.

Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia dan diharapkan menjadi suatu market yang sangat besar bagi pengembangan industri keuangan syariah. Perkembangan pasar modal syariah Indonesia dimulai ketika diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Danareksa Investment pada tahun 1997. Dalam rangka memandu investor yang ingin berinvestasi secara syariah, selanjutnya Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tahun 2000 dan menambah instrumen investasi syariah berupa obligasi syariah mudharabah serta sukuk korporasi pada tahun 2002. Selanjutnya, pada tahun 2008 diterbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pengadaan sistem *online trading* syariah pada tahun 2011 untuk memfasilitasi investor yang ingin bertransaksi saham syariah maupun *Exchange Traded Funds* (ETF). Infrastruktur pasar modal syariah terus diperkuat dengan penerbitan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), berbagai jenis produk syariah dari instrumen pasar modal yang dibuat pelaku industri, dan pemberian kepastian hukum oleh BAPEPAM-LK. Hal ini menunjukkan trend positif pertumbuhan pasar modal syariah untuk menarik investor lebih banyak dan bersaing dengan industri keuangan syariah lainnya.

Kinerja saham syariah berperan penting bagi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pengkategorian saham syariah harus melalui *screening* dari Dewan Standar Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saham syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) akan *direview* oleh OJK untuk menjelaskan sifat pergerakan jumlah saham syariah yang sangat dinamis berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan. Grafik 1.1 menunjukkan pergerakan jumlah saham syariah yang berfluktuasi di setiap periodenya. Sejak tahun 2007 hingga 2015, jumlah saham yang terdaftar pada DES terus mengalami peningkatan terutama jumlah efek pada periode I. Hal

tersebut menggambarkan adanya respon positif terhadap pasar modal syariah dari para emiten, perusahaan publik, dan investor yang menanamkan dananya.

Gambar 1.1 Perkembangan Saham Syariah



Sumber : Direktorat Pasar Modal Syariah-Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Head of Islamic Capital Market Development BEI Irwan Abdalloh mengungkapkan bahwa Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dimana ISSI tumbuh sebesar 43% sedangkan pertumbuhan IHSG sebesar 41% selama tahun 2011 hingga 2015. BEI dianggap berhasil memacu perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, dibuktikan dengan perolehan penghargaan *Global Islamic Finance Award (GIFA)* sebagai bursa efek pertama di dunia dan institusi pertama yang meraih penghargaan *Best Supporting Institution of The Year*. “Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan jumlah investor saham syariah sebesar 111% dimana terdapat 4.908 orang investor syariah di Indonesia sedangkan investor syariah di Malaysia sebesar 7.000 orang”, kata Irwan di Denpasar, Jumat (30/9). Tentunya penghargaan yang diperoleh BEI tersebut tidak lepas dari kerja keras BEI dalam rangka meningkatkan kemudahan akses ke pasar modal syariah Indonesia. BEI telah melakukan berbagai inisiatif untuk bersaing memperebutkan penghargaan tersebut, diantaranya pada tahun 2010 didirikan Sekolah Pasar Modal Syariah

(SPMS), tahun 2011 dibentuk *Syariah Online Trading System* (SOTS) dan tahun 2015 didirikan galeri investasi syariah.

Lain halnya dengan perkembangan kapitalisasi pasar saham syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*. Jumlah kapitalisasi pasar pada JII mengalami perkembangan yang sejalan dengan indeks sahamnya secara nominal, kecuali untuk tahun 2013 mengalami pergerakan berbeda, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1. Porsi kapitalisasi pasar saham di JII mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Namun pada tahun 2015 terjadi fluktuasi penurunan sebesar 11,92% dibanding tahun 2014 menjadi sebesar 1.737,29 triliun atau setara dengan 35,65% dari total kapitalisasi pasar saham. Sedangkan indeks saham JII selama tahun 2011 hingga 2015 mengalami pergerakan yang tidak stabil, dimana terjadi penurunan indeks saham sebanyak dua kali pada tahun 2013 dan 2015. Pada periode 2013 terjadi penurunan indeks saham sebesar 1,65% dibanding tahun 2012. Sedangkan pada periode 2015, JII ditutup pada level 603,35 poin atau menurun sebesar 14,53% dari tahun 2014.

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar Saham Syariah

Tahun	Indeks Saham				Kapitalisasi Pasar Saham (Triliun)			
	Indeks Syariah		Indeks Keseluruhan		Indeks Syariah		Indeks Keseluruhan	
	ISSI	JII	IHSG	LQ45	ISSI	JII	IHSG	LQ45
2011	125,36	537,03	3.821,99	673,51	1.968,09	1.414,98	3.537,29	1.414,98
2012	144,99	594,78	4.316,69	735,04	2.451,33	1.671,00	4.126,99	1.671,00
2013	143,71	585,11	4.274,18	711,14	2.557,84	1.672,09	4.219,02	1.672,09
2014	168,64	691,04	5.226,95	898,58	2.946,89	1.944,53	5.228,04	3.337,42
2015	145,06	603,35	4.593,01	792,03	2.600,85	1.737,29	4.872,70	2.953,10

Sumber: Laporan Triwulan IV Tahun 2015-Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan indeks saham dan porsi kapitalisasi pasar di JII yang bertolak belakang tersebut menjadi informasi penting bagi investor maupun pihak-pihak terkait lainnya pada entitas syariah. Oleh karena itu, perusahaan yang terdaftar di JII perlu meningkatkan lagi kualitas pelaporan yang akan diungkapkan untuk memenuhi

kebutuhan informasi para pihak terkait serta investor muslim khususnya. Hal itu dikarenakan ketika akan berinvestasi, mereka tidak hanya melihat kualitas pelaporan keuangan perusahaan saja. Berbagai informasi yang diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban sosial entitas syariah yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip syariah juga turut menjadi bahan pertimbangan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak terkait serta investor. Perusahaan yang terdaftar di JII sudah bisa dipastikan mempunyai aktivitas operasional bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan perusahaan yang masuk di JII telah melalui proses seleksi ketat dari pihak BAPEPAM-LK dan BEI, dimana hanya perusahaan dengan kriteria tertentu yang bisa lolos seleksi penilaian.

Upaya perbaikan dan peningkatan aktivitas dalam memaksimalkan laba diperlukan perusahaan supaya memperoleh dukungan publik yang cukup besar atas kelangsungan usahanya. Peningkatan aktivitas tersebut dapat diwujudkan oleh pihak manajemen melalui pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan baik secara internal maupun eksternal kepada *stakeholders*. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai inti dari etika bisnis perusahaan yang dapat digunakan sebagai sarana dalam mengomunikasikan perusahaan dengan *stakeholders* dimana legitimasi dapat diperbaiki dan keuntungan dapat diperoleh dari beberapa organisasi yang menggunakannya (Ahmad dan Sulaiman, 2004 dalam Nurkhin, 2010). Pemerintah Indonesia menjabarkan ketentuan terkait pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa dalam laporan tahunan perusahaan harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut menyebabkan pelaporan tentang CSR pada perusahaan yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi bersifat wajib (*mandatory*) untuk dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Saat ini, konsep CSR mulai berkembang di bidang ekonomi yang berbasis syariah, tidak hanya di bidang ekonomi konvensional saja. CSR yang disesuaikan

dengan nilai-nilai Islam ini dikenal dengan istilah *Islamic Social Reporting (ISR)*. Pada tahun 2002, Prof. Roszaini Haniffa melalui jurnalnya yang berjudul *Social Reporting Disclosure An Islamic Perspective* mulai memperkenalkan tentang ISR, dimana prinsip dan konsep tentang ISR dijelaskan dalam lima tema pengungkapan. Selanjutnya pada tahun 2009, Othman et. al mengembangkan penelitian Haniffa dengan jurnal berjudul *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia* yang didalamnya terdapat satu tema tambahan dalam pengungkapan ISR yaitu tema tata kelola perusahaan.

Semakin banyaknya peneliti yang berupaya mengembangkan ISR dan munculnya perusahaan-perusahaan yang mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya mengindikasikan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial entitas syariah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hingga saat ini, pelaporan tanggung jawab sosial pada institusi keuangan syariah di Indonesia masih belum seragam dikarenakan tidak adanya standar secara baku yang mengatur pelaporan tentang CSR perusahaan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman informasi mengenai konsep pelaporan ISR masih didominasi oleh sektor perbankan syariah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari minimnya penelitian tentang pengungkapan ISR yang diarahkan ke pasar modal atau sektor non perbankan. Padahal di BEI banyak perusahaan yang sudah menggunakan indeks syariah, salah satunya adalah *Jakarta Islamic Index*.

Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa pengukuran CSR dalam perspektif syariah masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative Index (Indeks GRI)*. Dalam penelitiannya, dia menyatakan bahwa pengukuran dengan menggunakan Indeks GRI belum menggambarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam, dimana belum mengungkapkan terbebasnya pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dari unsur *riba*, *gharar*, dan transaksi-transaksi lainnya yang diharamkan dalam Islam. Profil dan strategi organisasi, lingkup ekonomi, lingkup lingkungan, dan lingkup sosial merupakan indikator-indikator dalam indeks GRI yang tentunya kurang tepat jika digunakan oleh entitas syariah, seharusnya perusahaan diakui sebagai entitas

syariah dan dinyatakan memenuhi syariat Islam apabila perusahaan tersebut mengungkapkan informasi yang membuktikan bahwa kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum Islam (Al Farisi, 2015). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi bagi entitas syariah dibutuhkan suatu kerangka pelaporan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menanggapi kondisi di atas, akhirnya AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) membuat Indeks ISR sebagai tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah, selanjutnya peneliti lainnya mengembangkan tentang item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh entitas Islam (Othman et al, 2009). Sejalan dengan Maulida et al (2014) yang menyatakan bahwa indeks ISR merupakan pengembangan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Pembuatan indeks ISR diharapkan dapat mempermudah entitas syariah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sosialnya karena didalamnya terdapat konsep unik dimana mencerminkan nilai-nilai Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadits.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sangat terkait dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Dipika (2014) mengungkapkan bahwa penekanan yang dilakukan pada dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan RUPS merupakan konsep GCG yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional yang dijalankan oleh perusahaan. Jika dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, dewan komisaris dan komite audit mempunyai peran terhadap luasnya informasi yang akan disampaikan kepada publik. Jumlah anggota dewan komisaris yang semakin besar akan meningkatkan keefektivan dalam memonitoring manajemen, memudahkan upaya pengendalian terhadap CEO, dan meningkatkan tekanan terhadap manajemen dalam memperluas informasi pengungkapan tanggung jawab sosial (Coller dan Gregory, 1999 dalam Sembiring, 2005). Peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif apabila ukuran komite audit semakin besar.

Keterkaitan antara struktur *Good Corporate Governance* dengan pengungkapan CSR dapat dijelaskan melalui teori legitimasi. Chariri (2008) mengungkapkan bahwa praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan oleh perusahaan dalam menghindari konflik sosial dan lingkungan. Pada penelitian ini, penggunaan teori legitimasi mempunyai implikasi bahwa program ISR dilaksanakan entitas syariah dengan harapan untuk mendapatkan legitimasi dan nilai positif dari masyarakat sehingga perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang serta di masa mendatang dapat meningkatkan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas pada entitas syariah berupa tingkat pengembalian ekuitas dapat terwujud apabila pihak manajemen melaksanakan operasi perusahaan sesuai dengan perspektif Islam dengan baik tanpa disertai kecurangan yang mungkin dilakukan pihak manajemen.

Teori agensi menjelaskan bahwa para prinsipal akan mencari informasi dan memberikan insentif untuk memastikan tanggung jawab para agen terhadap kepemilikan perusahaan. Teori *stakeholders* menjelaskan bahwa investor maupun calon investor mengharapkan perusahaan dapat melaporkan tanggung jawab sosialnya secara luas. Sedangkan dalam *shariah enterprise theory*, Tuhan dijadikan sebagai pusat pertanggungjawaban. Oleh karena itu untuk memahami kebutuhan dan keinginan dari para *stakeholdersnya*, entitas syariah diharapkan dapat melaksanakan *good corporate governance* dengan baik yang akan meningkatkan kinerja keuangan. Peningkatan kinerja keuangan akan memperluas informasi terkait pengungkapan ISR yang sesuai dengan hukum Islam dan pada akhirnya investor akan tertarik untuk berinvestasi pada entitas syariah.

Pada tahun 2009, Othman et al melakukan penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* (ISR) untuk mencari tahu hubungan antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang listing di bursa Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi muslim berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sedangkan tipe industri tidak memberikan pengaruh signifikan. Khoirudin (2013) menguji pengaruh elemen *good corporate*

governance yang berupa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* juga dilakukan oleh Nurman dan Dewi (2013) yang mencari tahu pengaruh porsi kepemilikan saham publik, tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan status perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang tergabung di dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tanggal 30 November 2012. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, tipe industri, dan status perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* sedangkan kepemilikan saham publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian selanjutnya yang juga meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah penelitian Kariza (2014). Kariza (2014) melakukan penelitian atas variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan juga menambahkan variabel baru berupa kinerja lingkungan, likuiditas, dan *leverage* untuk dianalisis pengaruhnya terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan di *Jakarta Islamic Index (JII)* tahun 2013.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti dan menguji ulang mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perusahaan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menambah faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* dan menguji ulang faktor ukuran dewan komisaris, likuiditas, *leverage*, serta profitabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel ukuran komite audit yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan dapat mendorong upaya peningkatan perkembangan pasar modal syariah di negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan saham syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* sebagai objek penelitian. Pemilihan saham syariah di *Jakarta Islamic Index* sebagai objek penelitian dikarenakan saham-saham yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* mempunyai karakteristik *shariah complaint* atau karakteristik saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyesuaian saham syariah di *Jakarta Islamic Index* dilakukan setiap enam bulan (setiap awal bulan Juni dan Desember). *Jakarta Islamic Index* menggunakan 30 saham syariah paling likuid yang diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia dan terdiri dari berbagai sektor industri sehingga analisis terhadap objek penelitian lebih akurat dengan waktu yang runtut. Periode yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 periode mulai tahun 2011-2015, dimana selama tahun tersebut indeks saham syariah dan kapitalisasi pasar saham syariah di *Jakarta Islamic Index* mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul : **“ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*?

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan utama dalam upaya pengembangan teori maupun konsep terkait perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi syariah, khususnya tentang mekanisme *Good Corporate*

Governance dan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi :

1. Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) terkait mekanisme *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan agar dapat melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan syariah.

2. Investor

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi investor maupun calon investor, khususnya bagi investor muslim dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII).

3. Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya tentang masalah yang sama dan dapat diterapkan di masa yang akan datang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Shariah Enterprise Theory*

Menurut Triyuwono (2007:4), *enterprise theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan dan kelompok *stakeholders*, tetapi juga termasuk menempatkan Tuhan sebagai pusat pertanggungjawaban. Di dunia ini, manusia hanya sebagai *khalitullah fil ardh* (wakilNya) yang mempunyai konsekuensi untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Nilai-nilai yang terkandung pada teori ini disesuaikan dengan aturan-aturan yang diberlakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan tidak melanggar segala sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan lewat Al-Qur'an, Al-Hadits dan Fiqh.

Konsep *shariah enterprise theory* menekankan bahwa Allah dijadikan sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholders* merupakan sebuah amanah dari Allah untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah (Triyuwono, 2001 dalam Nastiti, 2016). Pernyataan tersebut sesuai dengan Haniffa (2002), mengungkapkan bahwa tauhid adalah konsep tertinggi dalam Islam. Tauhid disini diartikan sebagai bentuk penyerahan tak bersyarat dan keyakinan total kepada satu Tuhan, yaitu Allah SWT dengan dengan meletakkan semua tindakan dan keinginan sesuai dengan apa yang telah diperintahkanNya. Oleh karena itu, manusia dituntut patuh dan mendasarkan perilaku serta tindakannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah SWT.

Setelah Allah SWT sebagai *stakeholders* pertama, *stakeholders* kedua dari *shariah enterprise theory* adalah manusia yang dibedakan dalam dua kelompok, meliputi *directstakeholders* dan *indirectstakeholders*. *Directstakeholders* merupakan pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non keuangan, mereka mempunyai hak

untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan karena kontribusi yang telah mereka berikan. Sedangkan *indirectstakeholders* merupakan pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik secara finansial maupun non finansial. Walaupun *indirectstakeholders* tidak memberikan kontribusi, secara syariah mereka tetap berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari perusahaan akan hak kesejahteraannya. Golongan *stakeholders* terakhir dari *shariah enterprise theory* adalah alam. Alam merupakan pihak yang mampu memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan di samping Allah SWT dan manusia. Implikasi *shariah enterprise theory* dalam penelitian ini, bahwa sesungguhnya semua harta yang dimiliki oleh manusia di dunia ini hanyalah titipan dari Allah SWT yang bisa diambil sewaktu-waktu. Oleh karenanya, manusia harus mengelola harta titipan tersebut dengan sebaik mungkin.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Legitimasi masyarakat merupakan faktor yang dianggap penting bagi perusahaan untuk terus bertahan dan berkembang. Hal ini dapat dijadikan sebagai wahana dalam mengkonstruksi strategi perusahaan terutama yang berkaitan dengan usaha untuk memposisikan diri di tengah kondisi lingkungan masyarakat yang semakin berkembang dan maju (Hadi, 2009). Legitimasi diharapkan dapat mendorong keberlangsungan hidup (*going concern*) perusahaan dengan mendatangkan manfaat maupun sumber daya potensial bagi perusahaan.

O'Donovan (2002) dalam Hadi (2009) menyatakan bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang dapat diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang dicari atau diinginkan perusahaan dari masyarakat. Jika tidak terdapat keselarasan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat maka akan menyebabkan perusahaan tidak memperoleh legitimasi dan berakhir pada terancamnya kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Menurut Gray et al (1995) dalam Chariri (2008:160), teori legitmasi dan teori *stakeholders* adalah perspektif

teori yang berada di dalam kerangka teori ekonomi dan politik. Perusahaan akan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan dengan tujuan membenarkan atau melegitimasi perusahaan di mata masyarakat, hal tersebut dikarenakan luasnya pengaruh masyarakat dapat menentukan besarnya alokasi keuangan dan sumber ekonomi lainnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa legitimasi adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat ataupun kepada pemerintah. Perusahaan akan cenderung menaruh harapan yang besar bagi pihak-pihak yang mampu memberikan kontribusi dalam upaya mendukung perkembangan dan kemajuan perusahaan.

Teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan variabel mekanisme *Good Corporate Governance* sebagai dasar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan oleh perusahaan dalam menghindari konflik sosial dan lingkungan (Chariri, 2008). Pengungkapan CSR menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan sehingga pengungkapan CSR dapat digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi perusahaan di mata masyarakat. Perusahaan diharapkan dapat melaksanakan dan mengungkapkan segala aktivitas terkait pengungkapan tanggung jawab sosialnya semaksimal mungkin supaya segala aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Laporan tahunan menggambarkan kesan tanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang terus meningkat tersebut pada akhirnya akan dijadikan acuan bagi investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Harapan-harapan masyarakat terhadap perusahaan akan terpenuhi jika praktik tanggung jawab sosial dan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dijalankan sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Apabila perusahaan mempunyai usaha untuk selalu menyelaraskan diri dengan nilai dan norma di dalam masyarakat serta dapat

mengantisipasi terjadinya *legitimacy gap* maka perusahaan dapat terus bertahan hidup karena dianggap sah sesuai pandangan masyarakat dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

2.1.3 Teori Agensi

Permasalahan keagenan yang terjadi ketika pihak-pihak yang saling bekerja sama mempunyai tujuan dan pembagian kerja yang berbeda dapat diselesaikan dengan teori agensi. Teori agensi secara khusus menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, dimana para prinsipal akan mencari informasi dan memberikan insentif untuk memastikan tanggung jawab para agen terhadap kepemilikan perusahaan. Alijoyo (2004) dalam Rizkiningsih (2012) menyatakan bahwa teori agensi memfokuskan pada penentuan paling efisien yang dapat mempengaruhi hubungan antara prinsipal dan agen. Teori ini ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1889 dalam Darmawati, 2006). Pertama, terkait masalah keagenan yang timbul ketika keinginan atau tujuan dari prinsipal berlawanan dengan agen dan merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi pihak prinsipal dalam melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Kedua, keterkaitannya dengan masalah pembagian resiko yang mungkin akan muncul ketika prinsipal dan agen mempunyai sikap yang berbeda dalam mengatasi resiko. Timbulnya perbedaan preferensi resiko pada akhirnya menyebabkan prinsipal dan agen mempunyai preferensi tindakan yang berbeda-beda.

Menurut Alijoyo (2004) dalam Rizkiningsih (2012) ada beberapa asumsi yang terdapat pada *agency theory*, yaitu :

1. *Agency Conflict*

Konflik yang timbul antara prinsipal dan agen akibat keinginan manajemen (agen) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (prinsipal) dalam memperoleh

return dan nilai jangka panjang perusahaan. *Agency conflict* timbul pada berbagai hal sebagai berikut :

➤ *Moral-Hazard*

Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

➤ *Earning Retention*

Manajemen berusaha mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi yang positif.

➤ *Risk Aversion*

Manajemen berkeinginan mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Mereka cenderung mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam jangkuan kemampuan manajer serta cenderung menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah risiko bagi perusahaannya.

➤ *Time-Horizon*

Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cashflow* perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan yaitu keberpihakan pada proyek-proyek jangka pendek melalui pengembalian akuntansi yang tinggi dan kurang atau tidak berpihak pada proyek jangka panjang dengan pengembalian yang jauh lebih besar.

2. *Agency Problem*

Agency problem timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikan memberikan *return* yang maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana kepemilikan perusahaan.

Proses pembentukan sistem *good corporate governance* yang berperan menjembatani pemisahan kepentingan antara pemilik dengan pengelola dalam menjalankan tugas dan wewenang di suatu perusahaan memiliki hubungan dengan teori agensi. Pelaksanaan *good corporate governance* dimana para pendiri perseroan dapat membuat perjanjian yang seimbang antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (direksi) dapat terlaksana dengan adanya teori agensi tersebut. *Good Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan dan pengungkapan informasi yang lengkap antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya. Proses pembentukan sistem tata kelola perusahaan mempunyai hubungan dengan teori agensi yang akan memberikan batas terhadap kepentingan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Kepercayaan dari pihak manajemen (agen) dalam mengelola kekayaan investor (prinsipal), bahwa pihak manajemen tidak akan melakukan kecurangan bagi kesejahteraan prinsipalnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi.

2.1.4 Teori Stakeholders

Perusahaan cenderung lebih aktif dalam mengutamakan kepentingan sebagian kecil *stakeholders*nya sehingga menyebabkan kepentingan *stakeholders* lainnya terabaikan disaat menjalankan aktivitas bisnis. Artikel pada *New York Times Magazine* yang ditulis oleh Friedman (1970) dalam Ghozali dan Chariri (2007), mengklaim tentang perusahaan-perusahaan yang hanya beripikir tentang bagaimana cara mereka memperoleh keuntungan sedangkan permasalahan lain seperti peningkatan kemakmuran masyarakat lebih baik diserahkan kepada pihak pemerintah saja. Timbulnya hal tersebut menyebabkan munculnya teori *stakeholders* yang diharapkan dapat mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders*.

Gray et. al (1995) dalam Chariri (2008) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung kepada *stakeholders*nya dan dukungan tersebut harus dicari sebagai wujud aktivitas perusahaan. Pengungkapan sosial dianggap berperan sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholders*, sehingga semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi maka akan semakin *powerfull stakeholders*nya. Teori *stakeholders* mencerminkan tindakan dari manajemen perusahaan dalam usaha membuat laporan sesuai dengan keinginan dan *power* dari kelompok *stakeholders* yang berbeda-beda. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), *power* tersebut dapat berupa kemampuan perusahaan dalam menjembatani pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (tenaga kerja dan modal), kemampuan untuk mengatur perusahaan maupun mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, dan akses terhadap media yang berpengaruh.

Pihak internal maupun eksternal yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan dianggap sebagai bagian dari *stakeholders*. Pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan para *stakeholders* menjadi sorotan manajemen karena mereka terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas maupun kebijakan yang dilakukan dan yang akan diambil oleh suatu perusahaan. Pelaporan *Islamic Social Reporting* diharapkan menjadi sebuah keinginan dari *stakeholders* yang dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya* dimana perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan ISR tersebut kepada publik dan publik pada akhirnya akan menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan untuk mengelola dananya.

2.1.5 Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) atau pelaporan yang dilaksanakan perusahaan pada umumnya merupakan pemberian informasi atau bentuk pertanggungjawaban tentang aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. Bagi pihak di luar manajemen, laporan keuangan menjadi jendela informasi yang memungkinkan mereka dapat melihat kondisi di suatu perusahaan. Tingkat pengungkapan dari laporan keuangan

perusahaan menggambarkan luasnya informasi yang dapat diperoleh oleh pihak diluar manajemen perusahaan serta dipengaruhi oleh sumber pembiayaan, sistem hukum, keadaan ekonomi dan politik, tingkat perkembangan ekonomi, serta tingkat pendidikan dan budaya.

Pengungkapan dapat dikaitkan dengan dua aspek, yakni data dan laporan keuangan (Amuwarni, 2006 dalam Putri dan Yuyetta, 2014). Pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan dan pengungkapan juga mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha apabila dikaitkan dengan laporan keuangan. Informasi tersebut diungkapkan secara jelas, lengkap dan dapat menggambarkan segala aktivitas ekonomi yang akan berpengaruh terhadap hasil operasi bagi semua unit usaha di dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian di berbagai negara membuktikan bahwa media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan adalah laporan tahunan perusahaan.

Hananto (2009) dalam Raditya (2012) mengungkapkan bahwa transparansi merupakan prinsip dasar perusahaan dalam upaya menyampaikan informasi keuangannya kepada publik. Pengungkapan laporan keuangan perusahaan dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary*). Pengungkapan informasi yang diatur dan diharuskan oleh peraturan yang berlaku disebut sebagai pengungkapan wajib. Di Indonesia, peraturan tersebut dikeluarkan oleh BAPEPAM dan Lembaga Keuangan melalui Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002, Surat Edaran Nomor: SE-03/BL/2011 dan Surat Edaran Nomor: SE-02/BL/2008 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan apabila manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Pengungkapan sukarela dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna laporan keuangan lainnya serta dapat mendorong terwujudnya transparansi dalam bidang bisnis.

Terdapat tiga konsep pengungkapan menurut Hendriksen dan Breda (1992) dan Evans (2003) dalam Raditya (2012), meliputi:

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapatkan informasi yang sama.

3. Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Pengungkapan ini menuntut penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan melalui pengambilan keputusan.

Adanya ketiga konsep pengungkapan dan jenis pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan diharapkan dapat menarik minat masyarakat dan *stakeholders* dalam memilih perusahaan yang mampu mengelola dana yang mereka harapkan akan memberikan *return* dan nilai jangka panjang optimal di masa mendatang. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar dan adil serta bersifat transparan sesuai konsep ekonomi Islam. Informasi terkait keuangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus diungkapkan secara memadai selain pengungkapan minimum yang diwajibkan agar dapat dipahami oleh seluruh pengguna laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban sosial.

Berdasarkan perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi apabila informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berbeda dengan perspektif ekonomi Islam, suatu perusahaan akan menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparan apabila memiliki akuntabilitas terhadap Allah SWT. Konsep dasar dari akuntabilitas Islam ini percaya bahwa seluruh sumber daya yang telah disediakan dan diciptakan di muka bumi adalah untuk urusan kemaslahatan manusia. Pengungkapan terhadap fakta keuangan harus

berisi informasi yang benar, akurat, dan tersedia bebas untuk para pengguna laporan keuangan.

2.1.6 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan pelaporan sukarela perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Faktor-faktor lokal seperti agama, hukum, kondisi pemerintahan, dan budaya dapat menimbulkan definisi CSR yang berbeda-beda. Kegiatan CSR dilakukan dengan tujuan untuk merespon keadaan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar yang tidak hanya dinikmati oleh lingkungan sekitar sebagai sasaran utamanya, perusahaan juga akan menerima manfaat atas kegiatan mereka, khususnya dalam penciptaan, peningkatan, dan pemeliharaan citra perusahaan di mata masyarakat (Yulianita, 2008).

Pelaksanaan *good corporate governance* berperan penting dalam pelaksanaan CSR. Asas *responsibility* yang terdapat pada *corporate governance* berkaitan erat dengan CSR yang menjelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ditujukan kepada para *stakeholders*, tidak hanya ditujukan kepada *shareholders* saja demi keberlanjutan usaha di masa yang akan datang.

The World Business Council for Sustainable Development (2000) dalam Rizkiningsih (2012) mendefinisikan CSR sebagai berikut:

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR merupakan wujud kegiatan operasional perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan CSR sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan. Hal itu dikarenakan di dalamnya memuat segala aktivitas perusahaan sebagai upaya menjaga kondisi lingkungan dan

sosial masyarakat serta sebagai wujud dukungan perusahaan dalam rangka mendorong kelangsungan usahanya melalui pengelolaan lingkungan secara terpadu sehingga meminimalisir timbulnya pencemaran lingkungan.

2.1.6.1 Konsep *Corporate Social Responsibility* dalam Islam

Kamali (1989) dalam Fitria dan Hartanti (2010) mengungkapkan bahwa Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi dalam hal muamalah, tetapi tidak dalam hal ibadah, aqidah, dan akhlak. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bisnis. Dasar-dasar religius mampu menciptakan ikatan hubungan yang lebih kuat antara institusi dengan lingkungan dalam konsep syariah daripada dalam konsep konvensional. Sejalan dengan Osman (2001) dalam Fitria dan Hartanti (2010) yang menyatakan bahwa hubungan dan tanggung jawab antara manusia dengan Allah dalam konsep syariah akan melahirkan kontrak religius (*divine contract*) yang lebih kuat dan bukan hanya dalam bentuk kontrak sosial belaka.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia dan merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, serta menempatkan Allah SWT sebagai pemilik mutlak sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara yang berfungsi sebagai penerima amanah. Menurut AAOIFI, CSR dalam persepektif Islam meliputi segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial baik itu bagi individu maupun bagi institusi. *Discretionary responsibilities* mengacu pada ekspektasi yang diharapkan oleh pemegang saham bahwa institusi finansial yang kegiatan usahanya sesuai dengan syariah akan melaksanakan peran sosialnya dalam mengimplementasikan cita-cita Islam.

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain yaitu pelaku-pelaku organisasi, lingkungan alam, dan kesejahteraan sosial masyarakat. *Corporate Social Responsibility* merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam yang disesuaikan dengan hukum ketetapan Allah SWT.

Menurut Muhammad Djakfar dalam Darmawati (2014), implementasi CSR sesuai syariah Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat dibedakan dengan CSR secara universal. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Al-Adl

Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis timbul pada saat entitas mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan pelaksanaan operasional bisnis. Dalam Al-Quran Surat Huud ayat 85 Allah SWT berfirman yang artinya :

“Dan Syaib berkata, “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu), *ihtikar* (menimbun barang) yang berpotensi merugikan pihak lain.

2. Al-Ihsan

Al-Ihsan berarti melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders*. Implementasi *Corporate Social Responsibility* dengan semangat ihsan akan muncul seiring individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas dasar ridho Allah SWT.

3. Manfaat

Konsep manfaat dalam *Corporate Social Responsibility* diarahkan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan di bidang ekonomi, sosial, serta lingkungan. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis terhadap satu dari ketiga aspek yang ada.

4. Amanah

Konsep amanah dalam usaha bisnis merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan. Perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility*, harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis menjadi beban bagi perusahaan, misalnya menciptakan produk yang berkualitas serta menghindari segala perbuatan yang dilarang Islam dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Keempat unsur di atas diharapkan dapat menjadi tolak ukur perbedaan antara pengungkapan CSR secara syariah dengan pengungkapan CSR secara konvensional pada perusahaan yang *listing* di BEI. Calon investor dapat memilih untuk berinvestasi pada perusahaan konvensional atau pada perusahaan syariah yang dijalankan sesuai dengan hukum Islam.

2.1.7 Islamic Social Reporting (ISR)

Islam memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan zamannya. Umat Islam diwajibkan untuk bertanggung jawab kepada Allah SWT ketika melaksanakan segala aktivitasnya dengan tujuan mencapai ridhoNya. Fitria dan Hartanti (2010) menyatakan bahwa hubungan dan tanggungjawab antara manusia dengan Allah SWT akan menciptakan kontrak religius yang lebih kuat, sehingga kontrak tersebut harus senantiasa diperhatikan.

Social reporting dalam perspektif syariah berkaitan dengan pemahaman tentang akuntabilitas, keadilan sosial dan kepemilikan sosial (Maali et al, 2006 dalam Rizkiningsih, 2012). Sejalan dengan Haniffa (2002), dalam rangka memenuhi

kebutuhan religius para pengambil keputusan muslim maka muncullah *Islamic Social Reporting* (ISR). *Islamic Social Reporting* dibutuhkan untuk menampilkan akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi aktivitas bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan termasuk memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim. Konsep akuntabilitas terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dalam rangka memenuhi kebutuhan publik atas segala aktivitas bisnis yang dijalankan sesuai dengan syariah dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Konsep keadilan sosial mencakup keadilan kepada pelanggan, karyawan serta seluruh anggota masyarakat dimana sebuah entitas beroperasi. Sedangkan pada konsep kepemilikan, adanya kepemilikan individu diakui dalam Islam, tetapi pada dasarnya segala sesuatu merupakan milik Allah SWT sehingga manusia sebagai pemilik bertanggungjawab untuk menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan perintahNya.

Semakin berkembangnya pasar modal syariah, menuntut entitas syariah untuk dapat mengungkapkan laporan keuangan yang berisi dimensi religius dalam memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholders* maupun pihak lainnya karena model pelaporan tanggung jawab sosial yang selama ini dikembangkan dalam indeks CSR belum memenuhi informasi yang dibutuhkan dari segi syariah (Haniffa, 2002 dan Othman et al, 2009). Walaupun AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) telah mengeluarkan standar pengungkapan CSR secara syariah, namun standar tersebut belum dapat dijadikan sebagai standar pengungkapan yang baku karena didalamnya tidak menyebutkan keseluruhan item-item yang harus diungkapkan emiten syariah terkait pelaporan tanggung jawab sosialnya.

Berikut merupakan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas syariah (Meutia et al, 2010 dalam Nastiti, 2016).

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan sebuah pertanggungjawaban manusia terhadap Allah SWT dengan tujuan untuk memperoleh legitimasi dari Allah SWT semata.

2. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus bertujuan menyediakan informasi kepada *stakeholders* langsung maupun tidak langsung dalam hubungannya dengan sejauh mana entitas syariah telah memenuhi kewajiban seluruh *stakeholdersnya*.
3. Keberadaan pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk kewajiban yang dilihat dari peran entitas syariah sebagai sebuah instrumen yang digunakan untuk mewujudkan tujuan syariah.
4. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus menyertakan dimensi material dan spiritual terkait dengan kepentingan seluruh *stakeholders* dimana dasar dari pengungkapan tersebut adalah pertimbangan dari kepentingan publik.
5. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus mengandung informasi kuantitatif dan informasi kualitatif.

Berdasarkan kondisi di atas, para peneliti lainnya mencoba mengembangkan standar pelaporan tanggung jawab sosial bagi entitas syariah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Haniffa (2002) dan Othman et al (2009) mencoba mengembangkan indeks ISR, dimana indeks tersebut merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi, melainkan berkaitan juga dengan perspektif spiritual Islam yang menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh hubungan antara individu, perusahaan dan Allah SWT dengan berdasarkan konsep dasar Islam yaitu tauhid (keesaan terhadap Allah SWT).

Pengembangan ISR yang dilakukan oleh Haniffa (2002) didasarkan pada tiga dimensi syariah yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, memperoleh rahmat dari Allah SWT sebagai tujuan utama dalam rangka mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Kedua, mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan kewajiban masyarakat. Dan yang terakhir adalah mencapai kesejahteraan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup setiap individu. Haniffa (2002) mencoba mengembangkan lingkup pengungkapan ISR dalam lima tema yang meliputi: pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Berikut

merupakan lima tema pengungkapan ISR yang diusulkan oleh Haniffa (2002) beserta dengan item pengungkapannya.

Tabel 2.1 Prinsip Etika dan Konten dalam *Islamic Social Reporting*

No.	Tema	Etika	Konten
1.	Keuangan dan Investasi	Tauhid Halal vs Haram Wajib	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aktivitas Riba (mengidentifikasi aktivitas dan persentase kontribusi keuntungan) ➤ Aktivitas Gharar (mengidentifikasi aktivitas dan persentase kontribusi keuntungan) ➤ Zakat (jumlah dan penerima)
2.	Produk	Tauhid Halal vs Haram	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sifat produk atau jasa (mengidentifikasi aktivitas dan persentase kontribusi keuntungan)
3.	Karyawan	Tauhid <i>Adl</i> Amanah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gaji ➤ Sifat pekerjaan (ketentuan agama, hari libur dan jam kerja) ➤ Pendidikan dan pelatihan ➤ Kesempatan yang sama
4.	Masyarakat	Tauhid Ummah Amanah <i>Adl</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Sodaqoh</i> (jumlah dan penerima) ➤ <i>Wakaf</i> (jenis dan nilainya) ➤ <i>Qardh Hasan</i> (jumlah dan penerima)
5.	Lingkungan	Tauhid Khilafah <i>Mizan</i> <i>Akhirah</i> <i>I'tidal vs Israf</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penggunaan sumber daya (deskripsi dan jumlah) ➤ Konservasi lingkungan (deskripsi dan jumlah)

Sumber: Haniffa (2002)

Othman et al (2009), selanjutnya mengembangkan lima tema pengungkapan ISR yang telah diusulkan oleh Haniffa (2002). Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal jumlah tema yang diungkapkan pada pelaporan ISR. Othman et al (2009) mengusulkan enam tema pengungkapan ISR dengan menambahkan satu tema tentang tata kelola perusahaan dimana tema tersebut tidak terlepas dari upaya perusahaan dalam memastikan pengawasan intensif terhadap aspek syariah entitas bisnis. Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan meliputi rincian nama dan profil dewan direksi, status kepatuhan perusahaan terhadap syariah, dewan pengawas syariah dan komisaris, laporan kinerja dewan komisaris, kebijakan remunerasi dewan komisaris, laporan perkara hukum, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, anti terorisme, kebijakan anti korupsi serta struktur kepemilikan saham. Di Indonesia, prinsip *good corporate governance* bagi perbankan sudah diatur pada PBI No. 8 tahun 2006 tentang Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh bank komersial termasuk bank yang berbasis syariah, namun penerapan bagi perusahaan publik masih belum ada hingga saat ini. Berikut merupakan penjelasan keenam tema pengungkapan ISR yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendanaan dan Investasi

Tema pendanaan dan investasi berisi item pengungkapan terkait informasi apakah sumber pendanaan dan investasi perusahaan mengandung riba (*interest-free*) dan gharar (*speculative-free*) yang diharamkan dalam Islam, pengungkapan tentang zakat, kebijakan atas penghapusan piutang tak tertagih dan pernyataan nilai tambah dari manajemen perusahaan (Othman dan Thani, 2009). Riba dilarang dalam Islam karena riba merupakan transaksi tidak adil yang akan mengakibatkan pihak pemberi pinjaman semakin kaya dan pihak peminjam akan semakin miskin sehingga pada akhirnya menyebabkan terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam masalah pinjam meminjam (Dewi, 2012). Melihat kondisi lingkungan bisnis saat ini, segala aktivitas perusahaan selalu berhubungan dengan sistem politik dan ekonomi yang berlaku dan perusahaan senantiasa menjalin mitra

dengan berbagai organisasi di luar negeri sehingga sulit bagi perusahaan untuk berupaya menghindari transaksi riba dan gharar. Pro dan kontra muncul atas kondisi tersebut. Salah satu pihak menyebutkan bahwa transaksi riba dan gharar diperbolehkan secara temporer hingga kondisi perekonomian tidak lagi didominasi oleh kapitalisme. Lain halnya dengan Haniffa (2002) yang mengatakan bahwa bunga (riba) hanya diperbolehkan dalam situasi ekstrim yang dapat membahayakan jiwa manusia.

Gharar merupakan transaksi yang didalamnya terdapat ketidakpastian berupa *incomplete information*, meliputi kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Bentuk transaksi gharar dalam ekonomi konvensional meliputi perdagangan tanpa penyerahan (*future non delivery trading* atau *margin trading*), *short selling*, transaksi jual beli valuta asing yang tidak termasuk transaksi komersial (*arbitrage*) *spot* ataupun *forward*, *pure swap*, *capital lease*, *future*, *warrant*, *option* serta transaksi derivatif lainnya (Arifin, 2009 dalam Raditya, 2012). Transaksi riba dan gharar yang terkandung di dalam sumber pendanaan dan investasi perusahaan harus diidentifikasi, dilaporkan dan diungkapkan secara jelas untuk menghindari timbulnya dana ribawi.

Berikut merupakan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang menjelaskan tentang larangan kegiatan yang mengandung riba dan gharar:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah SWT dan rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Item pengungkapan selanjutnya yang terdapat pada tema pendanaan dan investasi adalah pembayaran zakat. Zakat merupakan pemberian harta tertentu dengan jumlah tertentu yang diwajibkan Allah SWT dengan tujuan penyucian jiwa dan harta (Haniffa, 2002). Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Allah

SWT memerintahkan umatNya untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat dan rukuk beserta orang yang rukuk. Entitas syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat dan mengungkapkan praktik pembayarannya dalam laporan tahunan sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah SWT atas perintahNya dan bentuk akuntabilitas dari entitas kepada masyarakat.

Kebijakan atas penghapusan piutang yang tidak tertagih merupakan item pengungkapan lainnya pada tema pendanaan dan investasi. Transaksi hutang piutang diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan dengan cara memberikan hutang atau pinjaman. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang menerangkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk memberikan penangguhan pembayaran hutang bagi peminjam yang mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang atau lebih baik lagi untuk menghapus sebagian atau seluruh hutang yang ada. Oleh karenanya, perusahaan sebaiknya terlebih dahulu mencari tahu alasan peminjam (debitur) tidak mampu melunasi hutangnya.

Item pengungkapan selanjutnya tentang pernyataan nilai tambah perusahaan (*value added statement*). Laporan nilai tambah adalah laporan keuangan yang lebih menekankan pada prinsip *full disclosure* dan didorong oleh kesadaran etika dan moral karena prinsip *full disclosure* menggambarkan kepekaan manajemen perusahaan terhadap proses aktivitas bisnis terhadap berbagai pihak yang terkait (Baydoun dan Willet, 2000). Penerapan laporan nilai tambah di Indonesia hingga kini belum berkembang seperti halnya di negara-negara maju, sehingga dalam penelitian ini akan mengikuti asumsi Dewi (2012) dengan mengasumsikan laporan nilai tambah dilihat dari pernyataan perusahaan mengenai nilai tambah yang biasanya tersurat pada laporan tahunan.

Item pengungkapan lainnya yang tidak digunakan peneliti dalam tema pendanaan dan investasi adalah *Current Value Balance Sheet* (CVBS) yang merupakan item pengungkapan tambahan dari Othman et al (2009). Sejalan dengan pendapat Rahayu (2016), bahwa klasifikasi CVBS tidak relevan sebagai

salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur indeks ISR. Pengukuran aset berwujud suatu entitas hanya diperbolehkan menggunakan model harga perolehan, sesuai dengan PSAK No.19 (revisi 2000). Namun, setelah diberlakukannya PSAK No.19 (revisi 2009) yang diarahkan menuju *current value*, entitas diperbolehkan memilih model harga perolehan maupun model revaluasi untuk mengukur aset tidak berwujud. Item pengungkapan CVBS tidak digunakan pada penelitian ini karena perhitungan nilai historis atas nilai-nilai akun pada neraca masih diberlakukan dalam PSAK No.19 (revisi 2009). Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, item pengungkapan dalam tema pendanaan dan investasi dapat dilihat pada lampiran 1.

2. Produk dan Jasa

Item pengungkapan yang terdapat pada tema produk dan jasa yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengungkapan dan pertanggungjawaban atas produk maupun aktivitas operasi yang ramah lingkungan, status kehalalan produk, keamanan dan kualitas produk serta pelayanan pelanggan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 menyatakan bahwa Allah SWT tidak memperbolehkan makhlukNya berbuat kerusakan di muka bumi. Efek rumah kaca, limbah pabrik yang mengakibatkan polusi air dan udara, *global warming*, hutan gundul, kekeringan, dan kebakaran hutan merupakan contoh dari kerusakan bumi yang sampai sekarang masih menjadi isu internasional yang sulit untuk ditanggulangi. Adanya hal tersebut, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia hendaknya berupaya menciptakan *green product* yang tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sebelum produk sampai ditangan pelanggan, hendaknya produk maupun jasa yang ditawarkan diidentifikasi terlebih dahulu status kehalalannya dan diidentifikasi atas kontribusinya pada laba suatu entitas syariah (Haniffa, 2002). Sejalan dengan Othman dan Thani (2010), entitas syariah diharapkan menawarkan produk yang bebas dari kategori haram yang dilarang dalam Islam, meliputi bebas dari alkohol, babi, judi, tempat hiburan dan senjata yang dapat membahayakan

jiwa manusia. Pihak berkepentingan muslim hendaknya memastikan halal atau haramnya suatu produk maupun jasa yang diproduksi oleh perusahaan dengan melihat sertifikasi kehalalan produk dari DSN-MUI sebelum mengambil keputusan berinvestasi.

Konsumen juga harus memperhatikan keamanan dan kualitas produk yang akan mereka konsumsi. Kepercayaan dan loyalitas konsumen akan meningkat seiring dengan tingginya keamanan dan kualitas produk maupun jasa yang ditawarkan sehingga perusahaan dituntut untuk melaporkan informasi terkait keamanan dan kualitas produk maupun jasa supaya pihak-pihak terkait tidak meragukan kredibilitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan (Raditya, 2012). Pelayanan pelanggan juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh konsumen karena kepuasan konsumen akan terus berlanjut setelah kegiatan jual beli yang mereka lakukan. Entitas syariah lebih baik mencantumkan layanan keluhan pelanggan sebagai sarana menjaga hubungan dengan pelanggan untuk memastikan bahwa keluhan mereka dapat ditangani secara efektif dan memuaskan. Item pengungkapan yang digunakan dalam tema produk dan jasa pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1.

3. Karyawan

Informasi terkait jam kerja, hari libur, upah maupun gaji karyawan, sifat pekerjaan, dukungan pelatihan dan pendidikan karyawan, kesetaraan hak bagi karyawan perempuan dan laki-laki serta karyawan yang berasal dari kelompok minoritas, kesempatan menunaikan ibadah, perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan, serta tunjangan maupun bonus hendaknya diungkapkan dalam laporan tahunan suatu entitas syariah. Karyawan harus diperlakukan dan dibayar secara adil serta pihak pemberi kerja harus menjamin pemenuhan kewajiban dasar dan spiritual karyawannya (Hanifa, 2002 dan Othman dan Thani, 2010). Pihak pemberi kerja dan pekerja diharapkan dapat memenuhi konsep amanah dan keadilan dalam pemberian manfaat ketika melakukan pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka item pengungkapan yang digunakan dalam tema karyawan secara lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1.

4. Masyarakat

Item pengungkapan dalam tema masyarakat meliputi segala tindakan yang dapat diberikan entitas syariah dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Konsep *umma*, *amanah*, dan *adl* yang menekankan pentingnya membagi tujuan umum dan menghilangkan penderitaan masyarakat merupakan item pengungkapan pada tema masyarakat yang dapat diberikan oleh suatu entitas syariah dimana item-item tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial (*sadaqah*), kepercayaan masyarakat (*waqf*) dan pemberian pinjaman tanpa memperhitungkan keuntungan (*qard hassan*) (Haniffa, 2002). Maali et al (2006) dalam Othman dan Thani (2010) menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan informasi dalam laporan tahunan mereka terkait upaya mengatasi permasalahan sosial (masalah perumahan, beasiswa, pemberantasan buta huruf, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat disekitar tempat beroperasinya suatu entitas syariah) dan peran perusahaan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, suatu entitas syariah diharapkan dapat melaporkan segala informasi terkait segala hal yang dapat mereka berikan kepada masyarakat sekitar. Item pengungkapan dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1 untuk lebih jelasnya.

5. Lingkungan

Perusahaan hendaknya tidak ikut terlibat pada aktivitas yang dapat menghancurkan atau merusak kondisi lingkungan hidup, lebih baik mengusahakan pengungkapan atas segala informasi tentang program perlindungan alam lingkungan (Othman dan Thani, 2010). Sejalan dengan Haniffa (2002) yang menyatakan bahwa perusahaan seharusnya mengungkapkan informasi terkait penggunaan sumber daya dan berbagai program yang dilakukan perusahaan dalam rangka melindungi lingkungan hidup, dimana informasi yang disampaikan tersebut mengandung konsep keseimbangan (*mizan*), pertengahan (*i'tidal*), *khilafah*, dan

akhirat. Aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan diusahakan memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan dapat mengurangi dampak pencemaran limbah pabrik yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, item pengungkapan tema lingkungan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kegiatan konservasi lingkungan, kegiatan untuk mengurangi efek pemanasan global, pendidikan tentang lingkungan, pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan yang digunakan oleh entitas syariah. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1.

6. Tata Kelola Perusahaan

Konsep khilafah mengawali munculnya tata kelola perusahaan dalam Islam. Allah SWT memberikan kepercayaan kepada manusia sebagai utusanNya di muka bumi ini untuk menjaga bumi dengan segala isinya dari segala bentuk kerusakan yang mungkin dilakukan oleh manusia. Sulaiman (2005) dalam Othman dan Thani (2010) menyatakan bahwa perusahaan hendaknya mengungkapkan kegiatan terlarang seperti praktik monopoli, manipulasi harga, perjudian, praktik penimbunan barang, dan segala kegiatan yang melanggar hukum lainnya. Sedangkan Othman et al (2009) memasukkan kebijakan anti korupsi pada item pengungkapan tema tata kelola perusahaan sebagai bahan pertimbangan para calon investor maupun pihak terkait lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42 :

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan (kesalahan, kejahatan, kemungkaran dan sebagainya) dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”

Perbedaan utama tata kelola perusahaan antara sistem konvensional dengan sistem Islam terletak pada aspek filosofi yang didalamnya terkait jenis keterlibatan kontrak perusahaan, pemain kunci dalam praktik tata kelola perusahaan, hubungan diantara pemain kunci dalam tata kelola perusahaan, dan tujuan perusahaan itu sendiri (Kasri, 2009 dalam Raditya, 2012). Terciptanya kontrak implisit antara

manusia dengan Allah SWT dan timbulnya kontrak eksplisit antara sesama manusia merupakan wujud kewajiban umat Islam terhadap Allah SWT dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dari perspektif syariah.

Penulis melakukan beberapa penyesuaian terkait item-item yang akan diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan. Kriteria pengungkapan terkait persentase dewan direksi muslim dan jumlah pemegang saham muslim tidak digunakan dalam penelitian ini, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012). Perusahaan maupun bursa saham di Indonesia, kebanyakan tidak memiliki data yang lengkap terkait agama yang dianut oleh para pemegang saham. Agama yang dianut oleh dewan direksi suatu perusahaan di Indonesia juga tidak dicantumkan dalam profil dewan direksi pada laporan tahunan. Item pengungkapan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi status kepatuhan entitas terhadap syariah, struktur kepemilikan saham, profil dewan direksi, pengungkapan melakukan praktik monopoli usaha atau tidak, pengungkapan melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok atau tidak, pengungkapan ada tidaknya praktik manipulasi harga, pengungkapan ada tidaknya perkara hukum, dan kebijakan anti korupsi di suatu entitas syariah yang dapat dilihat pada lampiran 1.

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi, melainkan berkaitan juga dengan perspektif spiritual Islam menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh hubungan antara individu, perusahaan dan dengan Allah SWT yang berdasarkan konsep dasar Islam yaitu tauhid (keesaan terhadap Allah SWT). Konsep keesaan terhadap Allah SWT menegaskan bahwa dalam Islam segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan hanya kepada Allah SWT dan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan perintahNya. Islam berkeinginan untuk menyelaraskan kegiatan ekonomi dan spiritual dalam kegiatan bisnisnya, maka dengan adanya pengungkapan atas pelaporan tanggung jawab sosial berdasarkan syariah ini menggambarkan bahwa sebuah entitas syariah telah

melaksanakan prinsip-prinsip *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* yang disesuaikan dengan konsep *good corporate governance*.

2.1.8 Good Corporate Governance (GCG)

2.1.8.1 Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Pelaksanaan *good corporate governance* dibutuhkan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi usaha pengembangan perusahaan yang baik dan sehat. Pada tahun 1992, *Cadbury Committee* mendefinisikan *corporate governance* sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Shleifer dan Vishny (1997) dalam Darmawati (2006) mengartikan *corporate governance* sebagai cara-cara yang digunakan dengan tujuan memberikan keyakinan kepada pemasok dana perusahaan sehingga perusahaan akan memperoleh *return* atas dana yang mereka investasikan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Nurkhin (2010) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sebuah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Corporate governance merupakan konsep yang secara nyata dijabarkan dalam bentuk ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga terkait tugas dan peran yang jelas dalam pelaksanaan fungsi *check and balance* perusahaan. *Corporate governance* berfungsi untuk mengatur pembagian tugas berupa hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non pemegang saham serta mengendalikan perusahaan agar menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat. Pelaksanaan GCG yang dijalankan dengan baik diharapkan dapat memberikan respon positif kepada masyarakat dan *stakeholders*.

2.1.8.2 Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dibutuhkan oleh manajemen perusahaan dalam rangka memberikan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, serta perlindungan tuntutan hukum bagi dewan direksi maupun dewan komisaris. Indikator keseimbangan kepentingan dapat diwujudkan melalui berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip *good corporate governance* dengan kepentingan para kreditur, manajemen perusahaan, karyawan, pemegang saham, serta para anggota masyarakat (Heriyanto, 2015). Keseimbangan kepentingan tersebut dapat tercapai apabila dalam diri para pengendali perusahaan terdapat kemauan untuk lebih mengutamakan kepentingan perusahaan dibanding dengan memaksimalkan keuntungan pribadinya.

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), asas *Good Corporate Governance* meliputi :

1. Transparansi (*transparency*)

Prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam penerapan akuntabilitas di antaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas pada jajaran direksi perusahaan.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. *Responsibility* juga mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen* (KNKG, 2004).

4. Independensi (*independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Prinsip kewajaran menekankan pada pemberlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh agen maupun manajer.

Pemaparan prinsip GCG diatas diharapkan dapat meningkatkan kepekaan perusahaan terhadap kebutuhan informasi *stakeholders*nya. Apabila perusahaan tidak dapat melaksanakan dan menjaga prinsip GCG dengan baik, *stakeholders* tidak akan memberikan kepercayaan yang tinggi pada perusahaan untuk mengelola dananya karena *stakeholders* menginginkan *return* dan nilai jangka panjang atas dana yang mereka investasikan saat ini. *Stakeholders* tentunya enggan menginvestasikan dananya apabila di awal mereka telah mengetahui bahwa kinerja perusahaan tidak cukup baik.

2.1.8.3 Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut *For Corporate Governance in Indonesia* (2003), *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mengembalikan kepercayaan investor asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan deviden.

Beragam manfaat dapat diperoleh dari penerapan *good corporate governance* pada perusahaan yang telah *listing* di BEI. Manfaat tersebut bisa dirasakan oleh pihak manajemen perusahaan sendiri, para *stakeholders*, hingga masyarakat yang merupakan pihak pengguna dari produk maupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan.

2.1.8.4 Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)

Indikator pada mekanisme *good corporate governance* meliputi komite audit, ukuran dewan komisaris, dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan latar belakang pendidikan komisaris. *Regulatory framework* merupakan sebutan yang digunakan terhadap indikator-indikator yang berpengaruh terhadap *good corporate governance* dan *good corporate governance* yang berpengaruh terhadap profitabilitas di perusahaan. Peran dewan komisaris independen sangat diperlukan untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktik kemandirian, transparansi, keadilan dan akuntabilitas menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian negara tertentu.

2.1.8.5 Dewan Komisaris

Salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam perusahaan adalah dewan komisaris. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Dewan komisaris berperan sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* berdasarkan aturan yang berlaku (KNKG, 2004 dalam Heriyanto, 2015). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 97 menyatakan bahwa dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan dewan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Penyimpangan yang dilakukan oleh dewan direksi dapat diselidiki dewan komisaris melalui penilaian atas berbagai jenis laporan berkala yang diterima dari dewan direksi untuk memastikan tindakan apa saja yang belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas wajib mempunyai paling sedikit dua anggota dewan komisaris (Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat 5). Di Indonesia jumlah anggota dewan komisaris berbeda-beda antar perusahaan, disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dan pertimbangan efektivitas pada saat pengambilan keputusan. Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama dalam melaksanakan fungsi monitoring atas implementasi kebijakan direksi, mengontrol perilaku manajemen perusahaan, mengarahkan strategi, dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian tujuan perusahaan. Pengawasan efektif yang dilakukan dewan komisaris memberikan dampak kepada pihak manajemen dalam hal pemenuhan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan perusahaan.

2.1.8.6 Komite Audit

Menurut Alijoyo (2003), komite audit adalah komite yang berperan membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal maupun internal. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004, komite audit harus diketuai oleh seorang komisaris independen. Komite audit beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Menurut (Surya dan Yustiavandana, 2006:145), anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari komite audit. Dewan komisaris nantinya akan menerima pertanggungjawaban dari komite audit dan keberadaannya di bawah dewan komisaris.

Komite audit memiliki tanggung jawab pada tiga bidang pada umumnya. Ketiga bidang tersebut meliputi (Ratnasari, 2011):

1. Laporan Keuangan

Tanggung jawab komite audit terhadap laporan keuangan adalah untuk memastikan laporan keuangan yang telah dibuat manajemen sudah menggambarkan kondisi keuangan, rencana, komitmen perusahaan jangka panjang dan hasil usaha yang sebenarnya.

2. Tata Kelola Perusahaan

Tanggung jawab komite audit terhadap tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan perusahaan telah dijalankan sesuai etika dan berdasarkan peraturan maupun undang-undang yang berlaku serta melakukan pengawasan yang efektif terhadap kecurangan yang kemungkinan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan dan pengawasan terhadap benturan kepentingan yang terjadi dalam suatu perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan

Tanggung jawab komite audit terhadap pengawasan perusahaan adalah untuk mengawasi sistem pengendalian intern, memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal dan berbagai hal yang berpotensi mengandung risiko.

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak independen. Independensi audit tidak dapat dipisahkan dari moralitas yang mendasari integritasnya. Komite audit ini bertugas membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Kebutuhan komite audit disebabkan karena belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dari dewan komisaris perusahaan.

2.1.9 Kinerja Keuangan

Salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya adalah kinerja keuangan (Pertiwi dan Pratama, 2012). Efektivitas suatu organisasi dapat terwujud apabila pihak manajemen mempunyai kemampuan dalam memilih alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai perbandingan (*ratio*) antara masukan dan keluaran, dimana perusahaan mengharapkan keluaran yang optimal atas aktivitas bisnis yang dijalankannya.

Kinerja keuangan perusahaan tidak selalu menggambarkan trend yang positif, oleh karena itu dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang ada. Barlian (2003) dalam Orniati (2014) mengungkapkan bahwa informasi kinerja keuangan dibutuhkan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang memungkinkan untuk dikendalikan di masa mendatang dan untuk memprediksi kapasitas produksi sumber daya yang ada. Hasil analisis laporan keuangan dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Analisis rasio berdasarkan data laporan keuangan perusahaan dapat memberikan manfaat

diantaranya mengetahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai perusahaan di masa lalu dan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan maupun hasil-hasil yang dianggap cukup baik bagi perusahaan. Hasil pengukuran kinerja dari rasio keuangan dapat dijadikan landasan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait *reward*, *punishment*, dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya serta dapat menciptakan nilai perusahaan bagi *stakeholdersnya*.

Menurut Syamsudin (2009:39) dalam Agustin et al (2013), terdapat dua metode analisis perbandingan yang digunakan untuk menganalisis rasio keuangan, meliputi:

1. *Time series analysis*

Time series analysis dilakukan dengan cara membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan antar periode. Perbandingan rasio yang dicapai di tahun ini dengan yang dicapai pada periode sebelumnya akan menunjukkan kondisi kemajuan atau kemunduran suatu perusahaan, dimana adanya kondisi tersebut dapat dijadikan dasar pembuatan rencana perusahaan yang ditujukan untuk masa yang akan datang.

2. *Cross-sectional approach*

Cross-sectional approach dilakukan dengan cara membandingkan rasio-rasio antar perusahaan yang sejenis pada saat yang bersamaan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa baik atau buruk suatu perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya.

Perusahaan dapat memilih salah satu diantara dua metode analisis perbandingan rasio keuangan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada masing-masing perusahaan. Rasio keuangan menggambarkan kondisi perusahaan apakah mengalami kemajuan atau kemunduran dan hasilnya dapat dijadikan sebagai landasan pihak manajemen perusahaan dalam pembuatan keputusan bagi keberlangsungan perusahaan ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

2.1.9.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan (Kasmir, 2012:110 dalam Kariza, 2014). Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ditunjukkan oleh tingkat likuiditas. Perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi cenderung memberikan sinyal kepada perusahaan lain untuk menunjukkan bahwa suatu perusahaan lebih baik dari perusahaan lainnya. Pemberian sinyal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang lebih luas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menarik investor dan menaikkan citra perusahaan. Pasar menganggap likuiditas sebagai ukuran kinerja dimana perusahaan yang mempunyai tingkat rasio likuiditas tinggi perlu melaporkan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan kuatnya kinerja mereka dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas rendah.

Berdasarkan teori legitimasi, kekuatan perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio likuiditas berhubungan dengan tingginya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Rahajeng, 2010 dalam Dewi 2012). Perusahaan dengan kondisi keuangan yang kuat akan berusaha mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosialnya secara luas untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan. Likuiditas dapat dilihat dari dua sisi (Cooke, 1989 dalam Almilia dan Retrinasari, 2007). Pertama dilihat dari sisi kesehatan perusahaan, kuatnya kondisi keuangan perusahaan akan ditunjukkan oleh rasio likuiditas yang tinggi. Kedua, jika likuiditas diukur sebagai kinerja suatu perusahaan, maka informasi yang lebih rinci akan diungkapkan oleh perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah dengan tujuan untuk menjelaskan penyebab lemahnya kinerja keuangan mereka.

Rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan meliputi (Sumarsan, 2013:45-46) :

1. Rasio lancar (*Current Ratio/CR*)

Rasio lancar menggambarkan kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek berdasarkan aktiva lancar yang dimilikinya. Rumus rasio lancar adalah sebagai berikut.

$$CR = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

2. Rasio dipercepat (*Acid Test Ratio* atau *Quick Ratio/QR*)

Rasio dipercepat menggambarkan kemampuan aktiva lancar dikurangi persediaan untuk membayar kewajiban lancar. Rasio ini meniadakan persediaan dalam perhitungan rasio karena persediaan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dikonversi menjadi kas. Rumus rasio dipercepat adalah sebagai berikut:

$$QR = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang lancar}}$$

3. Modal kerja bersih (*Net Working Capital/NWC*)

Modal kerja bersih merupakan alat ukur likuiditas yang diperoleh dari aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Rumus modal kerja bersih adalah sebagai berikut.

$$NWC = \text{Aktiva lancar} - \text{Kewajiban lancar}$$

Rasio yang umumnya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo adalah rasio lancar (*current ratio* atau CR). Rasio lancar mengukur seberapa banyak aktiva yang tersedia dalam menutupi kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya akan semakin tinggi seiring semakin besarnya nilai rasio lancar.

2.1.9.2 Rasio *Leverage*

Menurut Harahap (2010:306) dalam Kariza (2014), rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pembiayaan perusahaan dibiayai oleh hutang dengan cara membandingkan antara kewajiban dengan aset

(Harahap, 2010:306 dalam Kariza, 2014). Pengaruh pinjaman terhadap peningkatan kinerja perusahaan dapat diketahui berdasarkan hasil perhitungan rasio *leverage*. Rasio *leverage* yang umumnya digunakan oleh pemakai laporan keuangan adalah sebagai berikut (Sumarsan, 2013: 47) :

1. Rasio hutang (*Debt Ratio/DR*)

Rasio hutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya total aktiva yang dibiayai oleh pihak kreditur. Semakin tinggi rasio hutang, maka semakin banyak uang kreditur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$DR = \frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Total aktiva}}$$

2. Rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas (*Long Term Debt to Equity Ratio/DER*)

Rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, maka semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan sebaliknya. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$DER = \frac{\text{Total kewajiban jangka panjang}}{\text{Total ekuitas}}$$

Rasio *leverage* yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to equity ratio* merupakan rasio utang yang berguna mengukur perbandingan antara total utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas perusahaan, dengan rasio ini perusahaan dapat mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur terhadap pembiayaan perusahaan. Semakin tinggi tingkat *Debt to equity ratio* menunjukkan semakin besarnya jumlah modal pinjaman yang digunakan perusahaan dalam rangka meningkatkan keuntungannya. Keuntungan yang semakin meningkat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan sehingga kepercayaan berinvestasi pihak eksternal akan semakin besar.

2.1.9.3 Rasio Profitabilitas

Perusahaan cenderung akan melakukan pengungkapan yang lebih luas dalam laporan tahunnya apabila berada pada posisi menguntungkan. Sembiring (2005) menyatakan bahwa hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas diyakini mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial membutuhkan gaya manajerial yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan tujuan supaya keuntungan diperoleh perusahaan. Profitabilitas berfungsi memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Perusahaan memilih untuk mengungkapkan informasi yang luas dalam laporan pertanggungjawaban sosialnya ketika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas tinggi. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, diharapkan akan semakin meningkat pula motivasi perusahaan dalam mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya. Menurut Brealey (2008), rasio profitabilitas yang umumnya digunakan oleh pemakai laporan keuangan meliputi:

1. Margin Laba (*Profit Margin*)

Rasio *profit margin* menggambarkan besarnya laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan di setiap penjualan yang dilakukan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi antara laba bersih dengan penjualan. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan}}$$

2. Pengembalian atas Aset (*Return On Asset-ROA*)

Return On Asset menggambarkan tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan atas biaya modalnya, yang dihitung dengan membagi antara laba bersih ditambah bunga dengan rata-rata total aset. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih} + \text{Bunga}}{\text{Rata-rata total aset}}$$

3. Pengembalian atas Ekuitas (*Return On Equity-ROE*)

Return On Equity menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi antara laba bersih dengan rata-rata ekuitasnya. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Rata-rata ekuitas}}$$

4. Rasio Pembayaran Dividen (*Payout Ratio*)

Payout ratio mengukur seberapa besar proporsi laba yang dibayar dengan dividen. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$Payout\ Ratio = \frac{\text{Dividen}}{\text{Laba}}$$

Salah satu rasio yang sering digunakan untuk menghitung besarnya profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* digunakan untuk mengukur dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba sebenarnya yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin luas pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

2.1.10 *Jakarta Islamic Index (JII)*

Pemahaman dan ketertarikan masyarakat tentang kegiatan bisnis berbasis syariah semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Instrumen keuangan syariah yang beragam mulai diperkenalkan dalam rangka mendorong perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah. Salah satu produk pasar modal syariah yang masih terbilang baru dan sedang berkembang adalah *Jakarta Islamic Index* (JII). *Jakarta Islamic Index* adalah salah satu produk pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menggambarkan kinerja saham syariah di Indonesia. Bursa Efek Indonesia meluncurkan *Jakarta Islamic Index* pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Perhitungan *Jakarta Islamic Index* dimulai dari 2 Januari 1995 dengan angka indeks

dasar sebesar 100 agar data historikal yang dihasilkan lebih panjang. Menurut Soemitra (2009) dalam Putry et al (2016), *Jakarta Islamic Index* merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham dengan mengakomodasi investasi syariah dalam Islam atau indeks yang berdasarkan syariah Islam.

Prinsip-prinsip syariah pada bidang pasar modal diatur oleh fatwa DSN MUI tahun 2004 yang menyatakan bahwa suatu efek atau sekuritas di pasar modal dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari DSN MUI. Saham-saham yang terdaftar di JII ini tidak boleh memiliki unsur haram dalam kegiatan bisnisnya. Kriteria usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan arahan DSN dan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.A.13 meliputi :

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi.
2. Perdagangan yang dilarang menurut syariah yaitu perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa atau penawaran/permintaan palsu.
3. Jasa keuangan ribawi, antara lain: bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
4. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*masysir*).
5. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang/jasa yang haram zatnya (*hara li-dzaitihi*), yang haram bukan karena zatnya (*haramli-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan/atau yang merusak moral dan bersifat mudarat.
6. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap.

Saham syariah yang menjadi konstituen *Jakarta Islamic Index* terdiri dari 30 saham yang merupakan saham-saham syariah paling likuid dan mempunyai kapitalisasi pasar yang besar (*website* Bursa Efek Indonesia). *Review* saham-saham syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* dilakukan oleh BEI setiap enam bulan sekali yang disesuaikan dengan penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) oleh Otoritas

Jasa Keuangan. Bursa Efek Indonesia akan melakukan proses seleksi lanjutan yang didasarkan atas kinerja perdagangan saham-saham syariah setelah Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Daftar Efek Syariah.

Berikut merupakan proses seleksi JII yang dilakukan oleh BEI berdasarkan kinerja perdagangan saham syariah.

1. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham syariah yang termasuk ke dalam DES yang diterbitkan oleh OJK.
2. Dari saham-saham yang terpilih kemudian diambil 60 saham berdasarkan urutan kapitalisasi terbesar selama satu tahun terakhir.
3. Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas dengan urutan nilai transaksi terbesar di pasar regular selama satu tahun terakhir.

Saham-saham yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* bersifat dinamis yang setiap periode senantiasa *diupdate* supaya responsif terhadap pergerakan pasar di Bursa Efek Indonesia dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran *Jakarta Islamic Index* diharapkan dapat mendorong kemajuan pasar modal syariah Indonesia dengan menjadi tolak ukur kinerja (*benchmark*) dalam memilih portofolio saham yang halal (Oktaviana dan Wahyuni, 2011). *Jakarta Islamic Index* juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas sehingga akan menjadi panduan bagi investor yang ingin menanamkan dananya sesuai prinsip-prinsip Islam tanpa adanya rasa takut bahwa dananya akan tercampur dengan dana ribawi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Othman et al (2009)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Islamic Social Reporting</i> Pada Perusahaan yang <i>Listing</i> di Bursa Malaysia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen: <i>Islamic Social Reporting</i> 2. Variabel independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan direksi muslim serta tipe industri 3. Model: Regresi linier berganda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan direksi muslim berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>. 2. Tipe industri tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>.
2.	Amirul Khoirudin (2013)	Pengaruh Elemen <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen: <i>Islamic Social Reporting</i> 2. Variabel independen: <i>Good Corporate Governance</i> (ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah) 	Ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> perbankan syariah di Indonesia.

			3. Model: Regresi <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	
3.	Rifki Nurman dan Miranti Kartika Dewi (2013)	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) Pada Perusahaan yang Terdaftar dalam <i>Indonesia Sharia Stock Index</i> (ISSI)	1. Variabel dependen : <i>Islamic Social Reporting</i> 2. Variabel independen : Porsi kepemilikan saham publik, tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan status perusahaan 3. Model: Regresi linier berganda	1. Porsi kepemilikan saham publik memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> . 2. Tipe industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> . 3. Ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan jumlah karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> . 4. Profitabilitas yang diukur

				<p>berdasarkan ROE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>.</p> <p>5. Ukuran dewan komisaris yang diukur berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>.</p> <p>6. Status perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>.</p>
4.	Ayu Kariza (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Pada	<p>1. Variabel dependen : <i>Islamic Social Reporting</i></p> <p>2. Variabel independen :</p>	<p>1. Likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan</p>

		Perusahaan yang <i>Listing</i> di <i>Jakarta Islamic Index</i>	Ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan, likuiditas dan <i>leverage</i> 3. Model: Regresi linier berganda	<i>Islamic Social Reporting</i> pada JII. 2. Ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan, dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada JII.
--	--	--	--	---

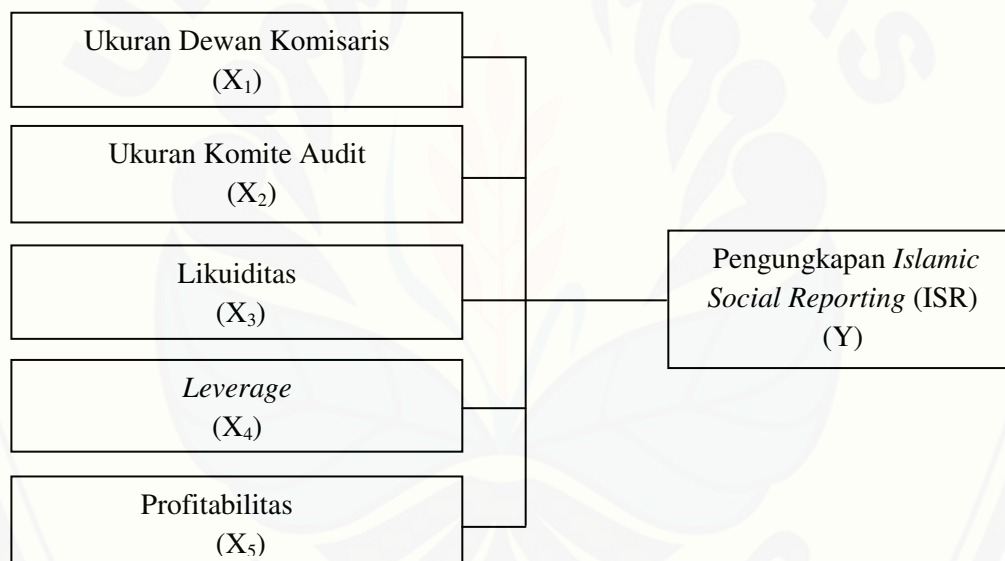
Hasil penelitian terdahulu tentang *Islamic Social Reporting* (ISR) memperlihatkan hasil pengaruh yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian replika dan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas. Faktor pembeda pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen dan objek penelitian yang digunakan. Variabel independen yang digunakan terdiri dari *good corporate governance* (dewan komisaris dan komite audit) dan kinerja keuangan (likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas). Penelitian ini menguji ulang faktor ukuran dewan komisaris, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* serta menambahkan faktor ukuran komite audit yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada *Jakarta Islamic Index* (JII). Objek penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di JII pada Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu selama lima tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Peneliti mempunyai keyakinan bahwa hasil penelitian yang akan didapatkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman dan informasi baru bagi

para *stakeholders*, masyarakat, investor, pemerintah, pengguna laporan perusahaan maupun para pembaca lainnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) akan diuji pengaruhnya pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.1 di atas menjelaskan bahwa dalam penelitian ini variabel independen *good corporate governance* dan kinerja keuangan akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Good corporate governance* merupakan sebuah sistem yang mengatur bagaimana organisasi dapat dioperasikan dan dijalankan dengan baik karena *good corporate governance* sebagai sarana interaksi yang mengatur antar struktur dan mekanisme yang menjamin adanya kontrol, namun tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Sedangkan kinerja keuangan sendiri mempunyai peranan penting dalam memberikan keyakinan kepada

perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya guna memperoleh nilai positif dari masyarakat. Praktik *good corporate governance* secara teoritis dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya dapat meningkatkan kepercayaan para investor.

Penerapan *good corporate governance* secara baik dan konsisten akan menunjang kegiatan perusahaan supaya berjalan secara efektif dan efisien, hal ini dikarenakan praktik *good corporate governance* bertujuan untuk melindungi setiap kepentingan *stakeholders* sehingga menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan perusahaan. Keharmonisan yang timbul akan menjadi modal dan motivasi penting bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya serta akan mempermudah dalam pencapaian tujuan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Semakin baik dan konsisten suatu perusahaan menerapkan *good corporate governance*, maka akan mendorong peningkatan kinerja keuangan sehingga perusahaan akan termotivasi untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya secara luas. Pada penelitian ini, *good corporate governance* dan kinerja keuangan dihipotesiskan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* periode 2011-2015.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rancangan hipotesis penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas memiliki hubungan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), maka dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Dewan komisaris adalah wakil dari *shareholders* perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas dan berfungsi sebagai pengawas manajemen. Menurut KNKG (2004) dalam Heriyanto (2015), dewan komisaris mempunyai wewenang dalam mengatur dan memonitoring mekanisme pengendalian internal tertinggi dan bertanggungjawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada pihak direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG dengan baik.

Pengaruh yang cukup kuat dapat diberikan oleh dewan komisaris dengan cara menekan pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi sosialnya secara luas dalam rangka mewujudkan akuntabilitas perusahaan. Manajemen mempunyai dorongan untuk mengungkapkan informasi yang menguntungkan bagi perusahaan dan akan menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Informasi yang menguntungkan akan diungkapkan secara lebih luas sedangkan informasi yang tidak menguntungkan cenderung akan disembunyikan atau tidak diungkapkan oleh perusahaan, sehingga berdampak kepada para pemegang saham yang tidak akan mengetahui secara khusus berbagai informasi yang tidak diungkapkan (Sembiring, 2005). Teori agensi dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan teori agensi, para pemegang saham akan mendelegasikan wewenang yang mereka miliki kepada dewan komisaris untuk memonitor aktivitas manajemen perusahaan.

Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka upaya pengendalian CEO dan monitoring yang dilakukan perusahaan akan berjalan semakin efektif (Coller dan Gregory, 1999 dalam Sembiring, 2005). Monitoring yang baik diharapkan dapat memperluas pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* dan dapat meminimalisir informasi yang kemungkinan disembunyikan oleh manajemen perusahaan. Dukungan *stakeholders* tersebut turut membantu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Hasil penelitian Khoirudin (2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia. Sejalan dengan Nurman dan Dewi (2013) yang membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Sebagai salah satu mekanisme *corporate governance*, komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komite audit merupakan komite yang berperan membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas dari auditor internal maupun eksternal (Alijoyo, 2003). Tugas komite audit yaitu menelaah kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan serta memberikan opini yang independen dan profesional atas aspek-aspek kepatuhan, pengendalian, dan manajemen risiko dari aktivitas audit internal maupun eksternal. Perusahaan diupayakan memusatkan perhatian untuk turut serta melaksanakan asas-asas *good corporate governance* sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan *shareholders*.

Fatimah et al (2016) melalui penelitiannya membuktikan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Keberadaan komite audit berperan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari keseluruhan *stakeholders* dan perubahan dalam masalah etika bagi pihak manajemen perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, para prinsipal akan berusaha mencari informasi dan memberikan intensif untuk memastikan tanggung jawab agen terhadap kepemilikan perusahaan. Komite audit yang bertanggungjawab atas laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi prinsipal. Prinsipal akan mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen berdasarkan informasi yang diperolehnya. Biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan dapat berkurang seiring dengan ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit.

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.4.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan evaluasi perusahaan oleh pihak yang berkepentingan seperti kreditur, investor, dan pemerintah setempat (Naser 1994 dalam Dewi, 2012). Kuatnya kondisi keuangan suatu perusahaan ditunjukkan oleh tingginya tingkat likuiditas. Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung mengungkapkan informasi yang luas kepada pihak eksternal perusahaan dengan tujuan untuk menunjukkan kredibilitasnya. Di sisi lain, informasi yang lebih rinci cenderung akan diungkapkan oleh perusahaan dengan

tingkat likuiditas rendah untuk menjelaskan penyebab lemahnya kinerja keuangan mereka (Cooke, 1989 dalam Almilia, 2007 dan Retrinasari).

Teori legitimasi menyebabkan perusahaan berupaya meningkatkan kinerja keuangan demi mendapatkan sorotan publik. Kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh kuatnya rasio likuiditas suatu perusahaan erat kaitannya dengan luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang lemah cenderung memberikan informasi yang lebih sedikit daripada perusahaan dengan kondisi keuangan yang kuat. Kebangkrutan perusahaan bisa saja terjadi ketika perusahaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian Kariza (2014) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Entitas syariah dengan kondisi keuangan yang kuat seharusnya cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi terkait laporan pertanggungjawaban sosialnya secara syariah untuk menunjukkan kepada pihak eksternal bahwa suatu entitas syariah bersifat kredibel. Luasnya pelaporan pertanggungjawaban tersebut akan meningkatkan minat investor dalam berinvestasi pada entitas syariah karena mereka percaya bahwa dananya akan dikelola tanpa adanya unsur ribawi.

Berdasarkan pendapat peneliti sebelumnya, likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa likuiditas memegang peranan penting bagi pihak investor, kreditur maupun pemerintah dalam evaluasi perusahaan. Kebangkrutan usaha merupakan dampak ekstrim yang akan ditimbulkan apabila perusahaan sudah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya sampai tanggal ditetapkannya jatuh tempo. Perusahaan cenderung akan mengungkapkan informasi secara luas dalam laporan pertanggungjawaban sosialnya terkait kemampuan mereka untuk mempertahankan kelangsungan hidup usaha dan pemenuhan kewajiban keuangan sampai tanggal jatuh tempo.

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.4.4 Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pembiayaan perusahaan dibiayai oleh hutang dengan cara membandingkan antara kewajiban dengan aset (Harahap, 2010:306 dalam Kariza, 2014). Rasio ini menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan dibiayai oleh hutang dari para kreditur sehingga perusahaan dapat menilai seberapa besar tingkat resiko hutang yang tidak tertagih. Irawan (2006) dalam Dewi (2012) menyatakan bahwa biaya pengawasan yang tinggi dalam rangka menyediakan informasi yang komprehensif akan ditanggung oleh perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi. Pemberi hutang maupun pemegang saham akan cenderung membutuhkan informasi yang lebih banyak tentang kondisi perusahaan dengan hutang yang besar sehingga kebutuhan informasi bagi kreditur akan lebih diutamakan oleh perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi (Kusuma, 2008).

Berdasarkan teori agensi diprediksi bahwa perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas, karena perusahaan dengan struktur modal seperti itu menanggung biaya keagenan yang lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Indrayani, 2014). Tingkat *leverage* yang tinggi menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya agensi yang besar pula. Transfer kemakmuran dari kreditur kepada manajer dan pemegang saham semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya biaya agensi. Hasil penelitian Mahmud dan Irianto (2011) menunjukkan bahwa *leverage* perusahaan berpengaruh secara statistik signifikan terhadap luas pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingginya *leverage* akan berdampak pada semakin besarnya biaya agensi sehingga perusahaan dituntut melakukan pengungkapan yang lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhan kreditur dalam jangka panjang.

Pengungkapan yang lebih luas hendaknya dilaporkan oleh perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi. Hal itu dikarenakan pemberi hutang maupun pemegang saham membutuhkan informasi yang jelas mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan dampak yang dapat ditimbulkan dari hutang jangka panjang terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.4.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Haniffa dan Cooke (2005) menyatakan hubungan positif antara profitabilitas dan pengungkapan sosial yang lebih luas dapat dilihat dari semakin banyaknya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan dapat menanggung biaya yang lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi yang luas pada laporan pertanggungjawaban sosial. Perusahaan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan kepada publik apabila perusahaan memiliki profit yang tinggi sehingga mempunyai kekuasaan penuh untuk menerapkan suatu kebijakan.

Terminologi profitabilitas biasa disebut sebagai kinerja ekonomi (*economic performance*) dalam beberapa penelitian. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara, antara lain margin laba (*profit margin*), pengembalian atas aset (*Return On Assets-ROA*), pengembalian atas ekuitas (*Return On Equity-ROE*), dan rasio pembayaran deviden (*payout ratio*) (Brealey, 2008). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dilakukan perusahaan. Sejalan dengan teori *stakeholders* yang menyatakan perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholders*nya.

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan ROA (*Return On Assets*) yang diperoleh dari laporan laba rugi komprehensif selama periode dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan laporan sosial mempunyai hasil yang beragam. Hasil penelitian Nurkhin (2010) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sejalan dengan hasil penelitian Othman et al (2009) dan Nurman dan Dewi (2013) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Kinerja ekonomi suatu perusahaan identik dengan profitabilitas, nilai perusahaan akan semakin meningkat seiring tingginya kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu upaya untuk menarik minat investor adalah dengan menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi. Perusahaan yang semakin untung akan berusaha menarik perhatian investor dengan cara menunjukkan luasnya informasi yang diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban sosial.

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory research* yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan fenomena yang terjadi di dunia empiris (*real world*) dan berusaha untuk mendapatkan jawaban (*verificative*) dalam rangka menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui analisis data dalam rangka pengujian hipotesis. Pendekatan kuantitatif digunakan selama pengujian teori penelitian melalui analisis data dengan prosedur statistik.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan dari rujukan teoritis yang relevan (buku, buletin, jurnal, majalah, surat kabar serta internet). Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan oleh perusahaan dan terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2011-2015. Laporan keuangan tahunan berasal dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah entitas syariah dari berbagai sektor usaha yang terdaftar pada *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2011-2015. Metode *purposive sampling* merupakan proses pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria sebagai berikut.

1. Perusahaan yang tercatat dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2011-2015.
2. Perusahaan yang tidak pernah *delisting* dari *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2011-2015.
3. Data-data tentang variabel penelitian yang diperlukan tersedia lengkap dalam laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan.
4. Perusahaan yang menggunakan mata uang pelaporan Rupiah.

Alasan pemilihan sampel dengan kriteria di atas bertujuan untuk menghindari terjadinya bias yang disebabkan oleh adanya perbedaan yang ekstrim.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*). Variabel terikat (*dependen*) merupakan tipe variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (Indriantoro dan Supomo, 2013:63). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Menurut Indriantoro dan Supomo (2013:63), variabel tidak terikat (*independen*) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi *good corporate governance* (ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit) serta kinerja keuangan (likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas).

3.4.1 Variabel Terikat atau *Dependent Variable*

Variabel terikat atau *dependent variable* pada penelitian ini adalah ISR yang diukur dengan nilai (*score*) dari ISR masing-masing perusahaan yang terdaftar di JII. Nilai ISR ini diperoleh dari hasil *content analysis*. Metode *content analysis* merupakan teknik analisis berbentuk dokumen dan teks yang berupaya menguantifikasi isi menurut indeks yang sudah ditetapkan dengan cara sistematis dan dapat diulang-ulang.

Penelitian ini tersusun dalam enam tema sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haniffa (2002) dan menggunakan adaptasi item pengungkapan indeks ISR yang dibuat oleh Othman et al (2009) dengan beberapa penyesuaian. Pertama, membuat daftar ISR sesuai dengan Othman et al (2009) dengan beberapa penyesuaian. ISR yang digunakan terdiri dari enam kategori, meliputi pembiayaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Kedua, memberikan nilai pada setiap komponen ISR secara dikotomi (*dischotomous procedure*), yaitu 1 apabila komponen tersebut diungkapkan dan 0 apabila komponen tersebut tidak diungkapkan (Haniffa, 2002 dan Othman et al, 2009). Ketiga, nilai yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total dari indeks ISR sejumlah 43 item pengungkapan dari 6 tema yang digunakan. Variabel dependen ini diberi simbol ISR. Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya *disclosure level* setelah *scoring* pada indeks ISR selesai dilakukan adalah sebagai berikut (Othman et al, 2009):

$$\text{Disclosure Level} = \frac{\text{Jumlah skor disclosure yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor maksimum}}$$

3.4.2 Variabel Tidak Terikat atau *Independent Variable*

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat dengan cara menekan pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi sosialnya secara luas dalam rangka mewujudkan akuntabilitas perusahaan. Pengawasan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan akan semakin baik apabila ukuran dewan komisaris semakin besar. Dewan komisaris mempunyai peran penting dalam mengawasi dan menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, termasuk informasi terkait pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang diukur dengan cara

menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan dan disebutkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan. Variabel ukuran dewan komisaris ini diberi simbol DK. Ukuran dewan komisaris diukur sebagaimana penelitian sebelumnya (Khoirudin, 2013), dengan rumus sebagai berikut:

Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah seluruh anggota dewan komisaris

2. Ukuran Komite Audit

Komite audit dijadikan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Karakteristik yang dapat mendukung efektivitas kinerja komite audit dalam suatu perusahaan adalah ukuran komite audit. Semakin besarnya ukuran komite audit dalam suatu perusahaan, pengawasan yang dilakukan diharapkan semakin baik pula sehingga akan memotivasi perusahaan untuk lebih meningkatkan pengungkapan informasi sosialnya.

Ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan cara menghitung jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan dan tercantum di dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel ukuran komite audit ini diberi simbol KA. Ukuran komite audit diukur sebagaimana penelitian sebelumnya (Ratnasari, 2011), dengan rumus sebagai berikut:

Ukuran Komite Audit = Jumlah seluruh anggota komite audit

3. Likuiditas

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ditunjukkan oleh tingkat likuiditas. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan yang lain untuk menunjukkan bahwa suatu perusahaan lebih baik dari perusahaan lainnya. Sinyal tersebut diberikan oleh perusahaan dengan cara mengungkapkan informasi yang cukup luas melalui laporan pertanggungjawaban sosialnya.

Nilai likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Current Ratio* (CR). Rasio lancar dapat dihitung dengan cara membagi aset lancar (*current*

assets) dengan liabilitas lancar (*current liabilities*). Data tentang aset lancar dan liabilitas lancar dapat diperoleh dari laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan selama periode yang telah ditentukan. Variabel likuiditas ini menggunakan satuan mata uang rupiah dan diberi simbol CR. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk mengukur rasio lancar (Sumarsan, 2013:45) :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

4. Leverage

Analisis yang dilakukan terhadap rasio *leverage* diharapkan dapat mengetahui sejauh mana pengaruh pinjaman yang diambil oleh perusahaan terhadap peningkatan kinerjanya. *Leverage* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang mengukur tingkat hutang di suatu perusahaan. DER dapat dihitung dengan cara membandingkan tingkat penggunaan hutang terhadap jumlah ekuitas perusahaan. Data tentang hutang dan ekuitas perusahaan dapat diperoleh dari laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan selama periode yang telah ditentukan. Variabel likuiditas ini menggunakan satuan mata uang rupiah dan diberi simbol DER. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk mengukur *Debt to Equity Ratio* (Sumarsan, 2013:47):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total kewajiban jangka panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

5. Profitabilitas

Profitabilitas identik dengan kinerja ekonomi di suatu perusahaan, dimana perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial secara luas dengan tujuan menarik minat investor untuk menanamkan dananya. Nilai profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). Rasio ROA

dapat dihitung dengan cara membagi nilai laba bersih (*net income*) ditambah bunga terhadap rata-rata total aset (*total asset*). Data tentang nilai laba bersih dapat diperoleh dari laporan laba rugi komprehensif selama beberapa periode dalam laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan. Variabel profitabilitas ini menggunakan satuan mata uang rupiah dan diberi simbol ROA. Untuk data nilai total aset dapat diperoleh dari laporan posisi keuangan dalam *annual report* perusahaan. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk mengukur *Return on Asset* (Brealey, 2008) :

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba bersih} + \text{Bunga}}{\text{Rata-rata total aset}}$$

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari *good corporate governance* (ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit) serta kinerja keuangan (likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas) yang merupakan variabel independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai variabel dependennya. Metode analisis data yang digunakan berupa analisis statistik deskriptif untuk mengetahui dispersi dan distribusi data. Uji normalitas dan uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi yang selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis di dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 22.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013:170). Menurut Indriantoro dan Supomo (2013:170), statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian yang utama untuk mengetahui hubungan

antara variabel penelitian. Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui deskripsi atau gambaran dari suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata (*mean*), nilai maksimum dan minimum serta standar deviasi atas variabel-variabel penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013:160). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam pengujian normalitas data penelitian. Uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah pengujian normalitas data dengan cara membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk *Z-Score* dan diasumsikan normal disebut sebagai distribusi normal baku. Pengambilan keputusan atas pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat adanya perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan populasi terdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat adanya perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan populasi tidak terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas dapat diartikan bahwa terdapat hubungan linier yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dengan model regresi (Shochrul et al, 2014 dalam Dewi, 2012). Tujuan dari uji multikolinieritas ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel tidak terikat (*independen*). Tidak terjadinya korelasi diantara variabel tidak terikat (*independen*) mencerminkan modal regresi yang baik.

Multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut (Ghozali, 2013: 105) :

1. Nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi oleh estimasi regresi empiris, namun secara individual variabel-variabel tidak terikat (*independen*) banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat (*dependen*).
2. Menganalisis matriks korelasi pada variabel-variabel tidak terikat (*independen*). Multikolinieritas terjadi apabila antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya 0,90). Tidak hanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinieritas. Adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen dapat menyebabkan terjadinya multikolinieritas.
3. Melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

$$\text{Variance Inflation Factor (VIF)} = \frac{1}{\text{Tolerance}}$$

Apabila nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan VIF ≥ 10 maka dapat diartikan terjadi multikolinieritas. Namun apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013:139). Apabila *varians* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolute residual dari model yang diestimasi terhadap variabel independen berdasarkan asumsi berikut :

1. Jika probabilitas signifikansi di atas tingkat 5% maka tidak mengalami heteroskedastisitas.

2. Jika probabilitas signifikansi di bawah tingkat 5% maka mengalami heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana *error* yang terjadi antar periode waktu memiliki hubungan, pada data *time series* umumnya ditemukan masalah autokorelasi ini. Menurut Ghozali (2013), pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$) dan dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (*DW test*). Metode ini digunakan untuk mengukur autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*).

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud dari korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya atau nilai periode setelahnya (Ghozali, 2013). Hipotesis yang akan diujikan meliputi:

H_0 = tidak ada autokorelasi

H_1 = ada autokorelasi

Sedangkan, dasar pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi ini meliputi:

1. Jika $0 < d < dl$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan ditolak.
2. Jika $dl \leq d \leq du$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan *no desicison*.
3. Jika $4 - dl < d < 4$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi negatif dengan keputusan ditolak.
4. Jika $4 - du \leq d \leq 4 - dl$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi negatif dengan keputusan *no desicison*.
5. Jika $du < d < 4 - du$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif dengan keputusan tidak ditolak.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*. Model analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression*) digunakan dalam penelitian ini karena variabel independennya lebih dari satu. Sebelum meregresi data dilakukan asumsi klasik terlebih dahulu supaya model regresi bebas dari bias. Persamaan yang digunakan dalam model regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$ISR_{it} = \alpha + \beta_1 DK_{it} + \beta_2 KA_{it} + \beta_3 CR_{it} + \beta_4 DER_{it} + \beta_5 ROA_{it} + e$$

Keterangan :

- ISR : Tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* perusahaan i pada periode t
- α : Koefisien konstanta
- β_{1-5} : Koefisien regresi variabel independen
- DK : Ukuran dewan komisaris perusahaan i pada periode t
- KA : Ukuran komite audit perusahaan i pada periode t
- CR : Likuiditas perusahaan i pada periode t
- DER : *Leverage* perusahaan i pada periode t
- ROA : Profitabilitas perusahaan i pada periode t
- e : Tingkat kesalahan (*error term*)

3.5.3.2 Uji *Adjusted R*² (Koefisien Determinasi)

Uji *Adjusted R*² (koefisien determinasi) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi dependen (Ghozali, 2013:97). Nilai *R*² antara 0 sampai 1, jika *R*² = 0 maka tidak terdapat hubungan yang sempurna. Sebaliknya, jika nilai *R*² = 1 maka terdapat hubungan yang sempurna antara variasi X dan Y atau variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.

Bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model merupakan kelemahan mendasar dari uji *Adjusted R²*. Setiap tambahan satu variabel independen, *R²* pasti akan meningkat tanpa memperhatikan apakah variabel tambahan berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²* yang dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3.5.3.3 Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier. Pengujian ini dilakukan untuk melihat bahwa model regresi yang digunakan telah signifikan atau belum dengan ketentuan jika *p value* < 0,05 ($\alpha = 5\%$) berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95% (Ghozali, 2013:84). Hipotesis yang digunakan dalam uji statistik F adalah sebagai berikut :

1. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau *p value* > 0,05 maka H_0 diterima, dimana koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau *p value* < 0,05 maka H_0 ditolak, dimana koefisien regresi signifikan. Hal ini berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

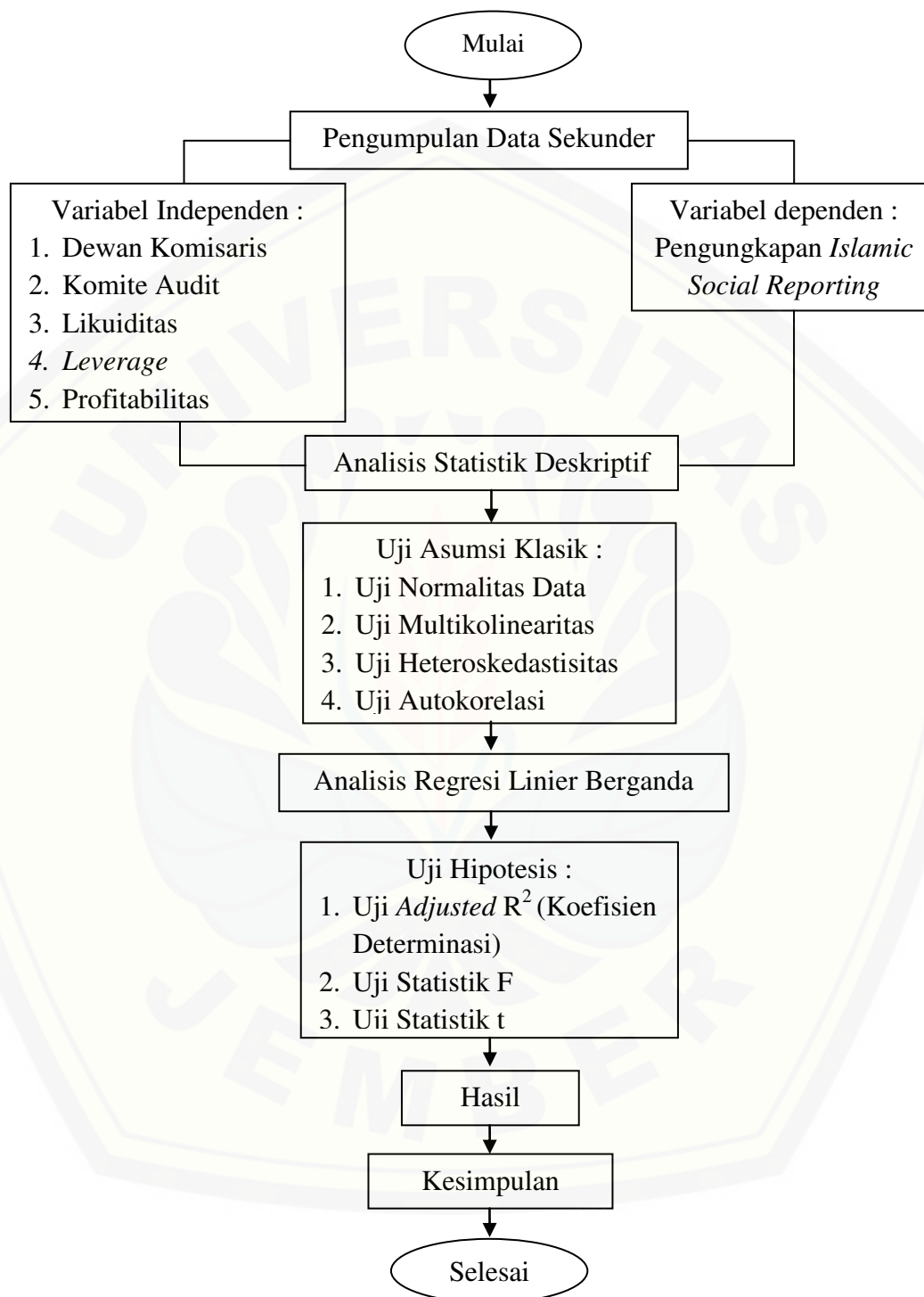
3.5.3.4 Uji Statistik t

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian koefisien regresi secara individual dengan menggunakan uji statistik t. Menurut Ghozali (2013:99), uji statistik t digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen secara partial (individu) dalam menjelaskan perilaku pada variabel dependen. Pengujian ini menganggap variabel independen lainnya konstan dan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan dan penolakan hipotesis pada uji statistik t ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 0,05$ maka hipotesis diterima (secara parsial variabel ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, likuiditas, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada laporan tahunan perusahaan).
2. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 0,05$ maka hipotesis ditolak, berarti (secara parsial variabel ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, likuiditas, *leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada laporan tahunan perusahaan).

1.5 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah pada Gambar 3.1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penelitian ini dimulai dari tahap pengumpulan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan dari *Jakarta Islamic Index* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
2. Melakukan perhitungan variabel independen yang terdiri dari dewan komisaris, komite audit, likuiditas, *leverage* dan profitabilitas serta variabel dependen berupa pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
3. Melakukan analisis statistik deskriptif.
4. Melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 22.
5. Melakukan analisis regresi linier berganda kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji *Adjusted R²* (koefisien determinasi), uji statistik F dan uji statistik t yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 22.
6. Mengambil kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang didapatkan.
7. Selesai, merupakan titik akhir penelitian.

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2011-2015, yang diukur dengan cara menganalisa laporan tahunan dan laporan keuangan auditan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 55 perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) dengan periode pengamatan selama lima tahun mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dan pemilihan sampel dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis dan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian regresi linier berganda atas hipotesis pertama menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
2. Hasil pengujian regresi linier berganda atas hipotesis kedua menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
3. Hasil pengujian regresi linier berganda atas hipotesis ketiga menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
4. Hasil pengujian regresi linier berganda atas hipotesis keempat menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

5. Hasil pengujian regresi linier berganda atas hipotesis kelima menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Keterbatasan yang ditemukan adalah :

1. Indeks ISR yang digunakan berasal dari indeks ISR penelitian Othman et. al (2009) dengan sedikit modifikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga menyebabkan kandungan unsur syariah pada pengungkapan ISR mengandung subjektifitas dari penulis.
2. Subjektifitas penulis dalam melakukan *skoring* pada saat penggunaan *content analysis* terhadap setiap item pengungkapan ISR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sampel.
3. Pada penelitian ini untuk mengukur ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris maupun komite audit yang tercantum di dalam laporan tahunan. Hal tersebut belum dapat sepenuhnya mencerminkan seberapa luas informasi yang akan disampaikan di dalam pengungkapan ISR pada perusahaan sampel.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya diantaranya meliputi :

1. Membuat pengembangan atas item-item pengukuran dalam indeks pengungkapan ISR supaya lebih komprehensif dalam menjelaskan *Islamic Social Reporting*.
2. Penggunaan metode *content analysis* lainnya dapat digunakan untuk mengurangi tingkat subjektivitas.

3. Untuk penelitian selanjutnya pengukuran ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit dapat diukur dengan menggunakan pengalaman kerja atau tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh dewan komisaris maupun komite audit di masing-masing perusahaan sampel.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Astrinika Linda., Darminto dan Handayani, Siti Ragil. 2013. *Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 2 (1).
- Almilia, L.S dan Retrinasari, Ikka. 2007. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*. Proceeding Seminar Nasional, FE Universitas Trisakti. Jakarta, 9 Juni 2007.
- Al Farisi, Jundhi Robbani. 2015. *“Pengaruh Mekanisme GCG, Investment Account Holder dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Anggraini, Vivi. 2015. *“Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), Profitabilitas dan Leverage Terhadap Earning Response Coefficient (ERC)”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Alijoyo, Antonius. 2003. *Keberadaan dan Peran Komite Audit dalam Rangka Implementasi GCG*. Seminar Nasional GCG-FKSPI BUMN/D Wilayah Jawa Timur, Surabaya, 7 Mei 2003.
- Asyhari, Lutfan Dwi. 2016. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Baydoun N dan Willet, R. 2000. *Islamic Corporate Reports*. ABACUS. Vol. 36 (1): 71-90.
- Brealey, Stewart C.Mayer dan Alan J.Marcus. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jilid 2, Edisi 5. Jakarta: Erlangga.
- Chariri, A dan Imam Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.

- Chariri, A. 2008. *Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan*. Jurnal MAKSI. Vol.8 (2): 151-169.
- Darmawati, D. 2006. *Pengaruh Karakteristi Perusahaan Dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance*. SNA IX, Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Darmawati. 2014. *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*. Jurnal MAZAHIB. Vol. XIII (2): 125–138.
- Dewi, Indah Fitri Karunia. 2012. “*Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Porsi Kepemilikan Publik atas Saham Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perusahaan Jakarta Islamic Index*”. Skripsi Universitas Indonesia.
- Dipika, Nur Anisa. 2014. “*Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019. Otoritas Jasa Keuangan.
- Fatimah, Siti., Makhdalena dan Trisnawati, Fenny. 2016. *Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social responsibility Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 s.d 2014*. Jurnal Universitas Riau.
- Fitria, Soraya dan Hartanti, Dwi. 2010. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Intitiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*. SNA XIII, Purwokerto, 2010.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multitative Dengan Program SPSS*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Nor. 2009. *Social Responsibility: Kajian Theoretical Framework dan Perannya dalam Riset di Bidang Akuntansi*. AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 (8).

- Haniffa, R. 2002. *Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*. *Indonesian Management & Accounting Research*. Vol. 1 (2): 128-146.
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. 2005. *The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting*. *Journal of Accounting and Public Policy* 24: 391-430.
- Heriyanto, Sherly. 2015. “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan*”. Skripsi Universitas Jember.
- Hidayati, Miftachul. 2015. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di OJK*. *Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim*.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama, Cetakan VI. Yogyakarta: BPFE.
- Indrayani, Vera. 2014. “*Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2010-2012*”. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Jannah, Awalya Ma’rifatul dan Asrori. 2016. *Pengaruh GCG, Size, Jenis Produk dan Kepemilikan Saham Publik*. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765. Vol. 5 (1): 1-9.
- Kariza, Ayu. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index*. *Jurnal Akuntansi*.
- Khoirudin, Amirul. 2013. “*Pengaruh Elemen Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia*”. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta, 17 Oktober 2006.

- Kurnia., Farida., Arslan., Herlambang dan Wediana. 2015. *Islamic Finance Outlook 2015*. KARIM: Consulting Indonesia.
- Kusuma, I. 2008. "Hubungan Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Tingkat Transparansi dan Pengungkapan". Skripsi Univeristas Indonesia.
- KNKG. 2004. *Corporate Governance*. Komite Nasional Kebijakan Governance. Jakarta.
- Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2013.
- Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015.
- Laporan Triwulanan, Triwulan IV-2015. Otoritas Jasa Keuangan.
- Mahmud, Muliyani dan Irianto, Sutrisno Gugus. 2010. *Faktor-Faktor Fundamental yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Univeristas Brawijaya.
- Maulida, Aldehita Purnasanti., Yulianto, Agung dan Asrori. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*. SNA XVII, Mataram, Lombok, 24-27 September 2014.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nastiti, Ari Sita. 2016. *Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Earnings Response Coefficient*. Jurnal Universitas Jember.
- Nurkhin, Akhmad. 2010. *Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Jurnal Magister Akuntansi. Vol. 2 (1): 46-55.
- Nurman, Rifki dan Dewi, Miranti Kartika. 2013. *Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)*. Jurnal Universitas Indonesia.

- Oktaviana, Ulfi Kartika dan Wahyuni, Nanik. 2011. *Pengaruh Perubahan Komposisi Jakarta Islamic Index Terhadap Return Saham*. Jurnal eL-QUDWAH. Vol. 1 (5): 1-21.
- Olavia, Lona. 2016. BEI Raih Penghargaan Tertinggi Efek Syariah. www.beritasatu.com. <http://www.beritasatu.com/edukasi/289687-bei-raih-penghargaan-tertinggi-efek-syariah.html>. [3 Oktober 2016].
- Orniati, Yuli. 2014. *Laporan Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis. ISSN: 0853-7283. (3): 206-213.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. 2009. *Determinants of islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia*. *Resarch Journal of International Studies*. Issue 12: 4-20.
- Othman, R dan Thani, Azlan Md. 2010. *Islamic Social Reporting Of Listed Companies in Malaysia*. *International Business & Economics Research Journal*. Vol. 9 (4): 135-144.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Pasar Modal Syariah Desember 2015*. Direktorat Pasar Modal Syariah- Otoritas Jasa Keuangan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- Pertiwi, Tria Kartika dan Pratama, Ferry Madli Ika. 2012. *Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverage*. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan. Vol. 14 (2): 118-127.
- Putri, Tria Karina dan Yuyetta, Etna Nur Afri. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011–2012". *Diponegoro journal of accounting*. ISSN (Online): 2337-3806. Vol.3 (2): 1-9.
- Putry, Galishia., Sugema, Imam dan Lubis, Deni. 2016. *Analisis Perbandingan Excess return Jakarta Islamic Index dan Indeks Harga Saham Gabungan*. Jurnal Al-Muzara'ah. ISSN p: 2337 - 6333; e: 2355 - 4363. Vol. 2 (2): 118-130.

- Raditya, Amilia Nurul. 2012. “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)*”. Skripsi Universitas Indonesia.
- Rahayu, Tantri Puji. 2016. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*”. Skripsi Universitas Jember.
- Rama, Ali dan Meliawati. 2014. *Analisis determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.2 (1): 95-115.
- Ratnasari, Yunita. 2011. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report*. Jurnal Univeristas Diponegoro.
- Rizkiningsih, Priyesta. 2012. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*”. Skripsi Universitas Indonesia.
- Savira, Mariska Nanda. 2015. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Cross-Directorship, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Sembiring, Eddi Rismanda. 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Study Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. SNA VIII, Solo. Sumatera Utara: Universitas Katolik St. Thomas.
- Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Edisi 1, Cetakan 1. ISBN 979-3925-76-0. Jakarta: Kencana.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi Dan Pengukuran Kinerja*. Cetakan 1, Edisi 2: 35-57. Jakarta: Indeks.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.

Yulianita, Neni. 2008. CSR Sebagai Aktivitas “*Social Marketing Public Relations*”.

MEDIATOR. Vol.9 (1).

www.idx.co.id. Diakses tanggal 27 September 2016.

www.sahamok.com. Diakses tanggal 23 September 2016.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR)

	POKOK PENGUNGKAPAN	PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN TAHUNAN	POIN	SUMBER REFERENSI
A	TEMA PEMBIAYAAN DAN INVESTASI			
1	Aktivitas <i>riba</i>	Beban bunga dan pendapatan bunga	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009)
2	Pengungkapan kegiatan yang mengandung <i>gharar</i>	<i>Future non delivery trading, margin trading, short selling, warrant, hedging, arbitrage baik spot maupun forward, pure swap, dll</i>	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
3	Zakat	Pengelolaan zakat, pembayaran zakat, dll	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	Kebijakan perusahaan atas keterlambatan pembayaran piutang, kebijakan perusahaan	1	Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti

		untuk menghapus piutang tak tertagih, dll		(2010)
5	Pernyataan nilai tambah perusahaan	Nilai tambah perusahaan, nilai tambah perusahaan bagi masyarakat, dll	1	Othman et. al (2009)
B	TEMA PRODUK DAN JASA			
6	Produk atau kegiatan operasi ramah lingkungan (<i>green product</i>)	Produk yang ramah lingkungan, memilih teknologi yang ramah lingkungan, dll	1	Othman et. al (2009)
7	Status kehalalan produk	Sertifikat kehalalan produk dari MUI, pernyataan produk halal, dll	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009)
8	Keamanan dan kualitas produk	Keamanan produk dan kualitas produk	1	Othman et. al (2009)
9	Pelayanan pelanggan (<i>consumer oriented</i>)	Pelayanan pasca jual, pengadaan pusat pengaduan konsumen, dll	1	Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
C	TEMA KARYAWAN			
10	Sifat pekerjaan	Jam kerja, hari libur, cuti, dll	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009) Fitria dan

				Hartanti (2010)
11	Pendidikan dan pelatihan kerja	Pelatihan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dll	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
12	Kesetaraan hak antara pria dan wanita	Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan gender, kesetaraan hak antara karyawan pria dan wanita, dll	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
13	Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan	Dilibatkannya karyawan dalam diskusi manajemen, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, dll	1	Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
14	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
15	Lingkungan kerja	Pernyataan tentang lingkungan kerja	1	Othman et. al (2009)

				Fitria dan Hartanti (2010)
16	Karyawan dari kelompok khusus	Karyawan cacat fisik, mantan pecandu narkoba ataupun mantan narapidana	1	Othman et. al (2009)
17	Karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama-sama dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah	Pelaksanaan kegiatan ibadah bersama-sama antara karyawan tingkat atas dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah	1	Othman et. al (2009)
18	Kewajiban berdoa selama waktu tertentu dan berpuasa Ramdhan pada saat bekerja	Kewajiban berdoa, melaksanakan ibadah puasa Ramadhan pada saat bekerja atau kegiatan buka puasa bersama	1	Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
19	Sarana ibadah yang memadai untuk para karyawan	Keterangan tentang sarana ibadah yang memadai untuk karyawan	1	Othman et. al (2009)
D	TEMA MASYARAKAT			
20	Sedekah, donasi, atau sumbangan	Sedekah, donasi, atau sumbangan	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009)

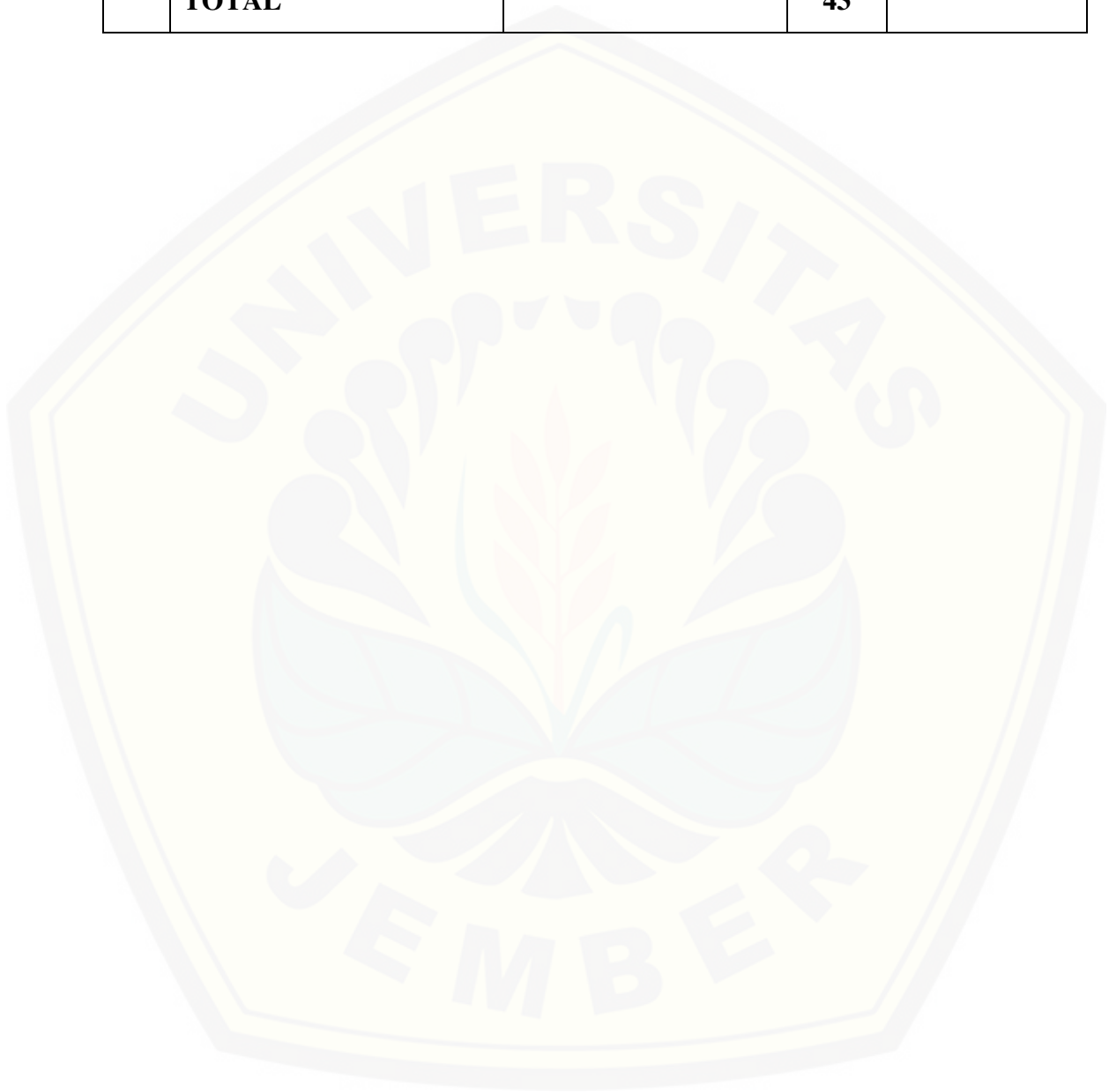
21	Wakaf	Keterangan tentang pelaksanaan wakaf perusahaan	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009)
22	Dana kebajikan (<i>Qard Hassan</i>)	Keterangan tentang pengelolaan dana kebajikan perusahaan	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009)
23	Sukarelawan dari kalangan karyawan	Sukarelawan dari kalangan karyawan dalam kegiatan sosial maupun kegiatan lain	1	Othman et. al (2009)
24	Pemberian beasiswa	Pemberian beasiswa sekolah dari perusahaan	1	Othman et. al (2009)
25	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah	Magang, praktik kerja lapangan, dll	1	Othman et. al (2009)
26	Pengembangan dalam kepemudaan	Pemberian bekal keterampilan bagi pemuda, dukungan pemberdayaan usaha bagi pemuda, dll	1	Othman et. al (2009)
27	Peningkatan kualitas hidup masyarakat	Kegiatan pengembangan masyarakat, pemberian pelatihan kepada masyarakat, dll	1	Othman et. al (2009)
28	Kepedulian terhadap anak-anak	Pelaksanaan berbagai program terkait anak-	1	Othman et. al (2009)

		anak, pengadaan kegiatan edukatif menarik untuk anak-anak, dll		
29	Kegiatan amal atau kegiatan sosial	Bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur, dll	1	Othman et. al (2009)
30	Mensponsori kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan	Melaksanakan berbagai aktivitas di bidang bantuan pendidikan, kesehatan, dll	1	Othman et. al (2009)
E	TEMA LINGKUNGAN			
31	Konservasi lingkungan hidup	Pengadaan kegiatan yang mendukung konservasi lingkungan, melakukan konservasi tanaman lokal, dll	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
32	Kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global	Meminimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dll	1	Othman et. al (2009)
33	Pendidikan mengenai lingkungan	Melaksanakan kegiatan terkait pendidikan mengenai	1	Othman et. al (2009)

		lingkungan		
34	Pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan	Pelaksanaan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) telah diaudit, perusahaan menjalankan kegiatan pengelolaan lingkungan yang mencakup sistem audit lingkungan, dll	1	Othman et. al (2009)
35	Sistem manajemen lingkungan	Perusahaan menjalankan kegiatan pengelolaan lingkungan yang mencakup sistem manajemen lingkungan, pernyataan tentang manajemen lingkungan perusahaan, dll	1	Haniffa (2002) Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN			
36	Status kepatuhan terhadap syariah	Pernyataan patuh terhadap syariah atau patuh terhadap DSN (Dewan Syariah Nasional)	1	Othman et. al (2009)

37	Struktur kepemilikan saham	Keterangan kepemilikan saham	1	Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
38	Profil dewan direksi	Profil dewan direksi	1	Othman et. al (2009)
39	Pengungkapan melakukan praktik monopoli usaha atau tidak	Melakukan praktik monopoli usaha atau tidak melakukan praktik monopoli usaha	1	Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
40	Pengungkapan melakukan praktik menimbun bahan kebutuhan pokok atau tidak	Melakukan praktik menimbun bahan kebutuhan pokok atau tidak melakukan praktik menimbun bahan kebutuhan pokok	1	Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
41	Pengungkapan melakukan praktik manipulasi harga atau tidak	Melakukan praktik manipulasi harga atau tidak melakukan praktik manipulasi harga	1	Othman et. al (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
42	Pengungkapan adanya perkara hukum atau tidak	Adanya perkara hukum atau tidak adanya perkara hukum	1	Othman et. al (2009)
43	Kebijakan anti korupsi	Kode etik,	1	Othman et. al

		<i>whistleblowing system, dll</i>		(2009)
	TOTAL		43	



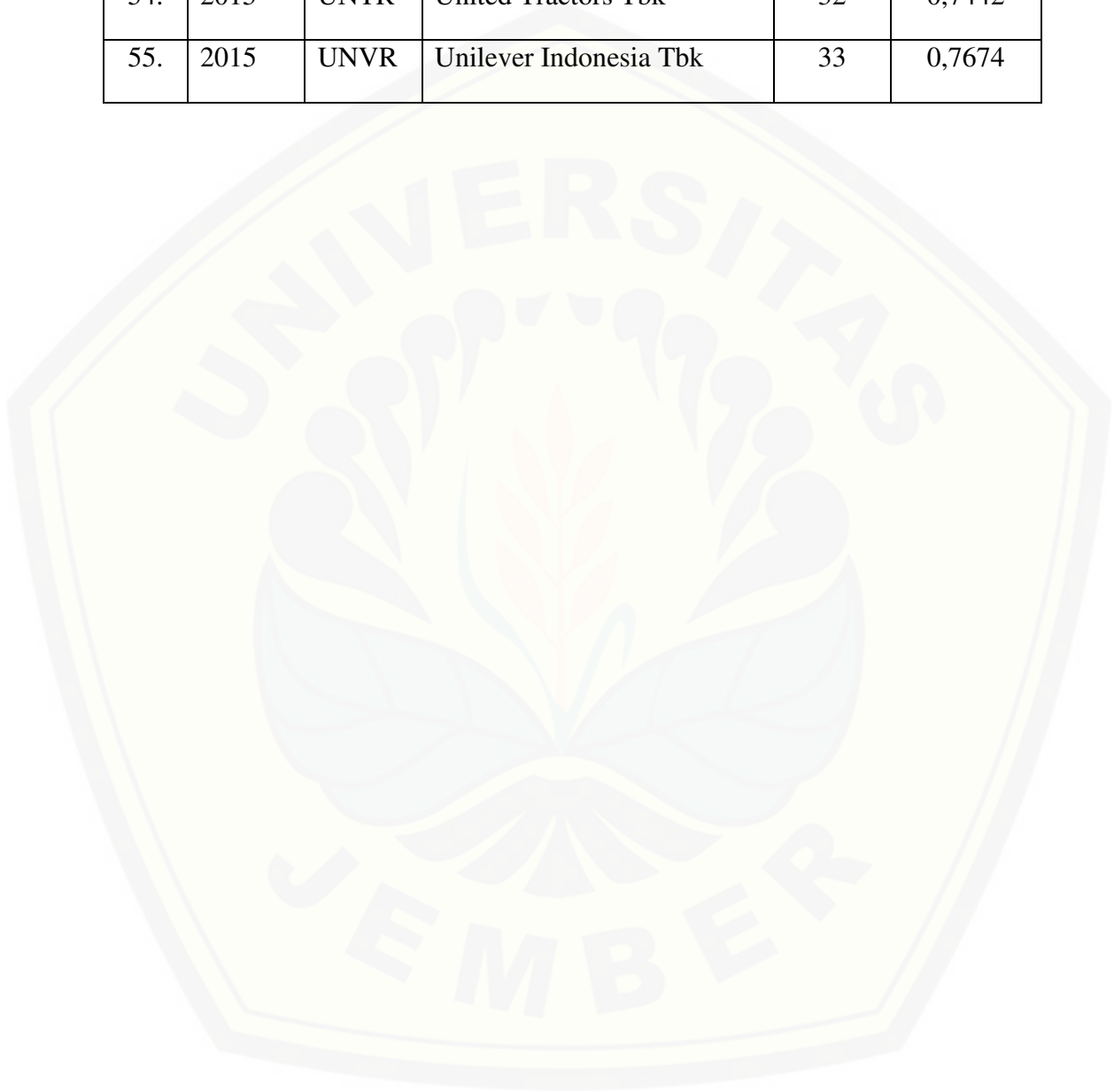
Lampiran 2. Skor Indeks ISR Perusahaan Sampel Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Kode Emiten	Nama Perusahaan	Skor Indeks ISR	<i>Disclosure Level</i>
1.	2011	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	17	0,3953
2.	2011	ASII	Astra International Tbk	34	0,7907
3.	2011	ASRI	Alam Sutera Reality Tbk	12	0,2791
4.	2011	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	19	0,4419
5.	2011	KLBF	Kalbe Farma Tbk	29	0,6744
6.	2011	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	23	0,5349
7.	2011	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	19	0,4419
8.	2011	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	26	0,6047
9.	2011	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk	30	0,6977
10.	2011	UNTR	United Tractors Tbk	31	0,7209
11.	2011	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	28	0,6512
12.	2012	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	19	0,4419
13.	2012	ASII	Astra International Tbk	34	0,7907
14.	2012	ASRI	Alam Sutera Reality Tbk	15	0,3488
15.	2012	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	23	0,5349
16.	2012	KLBF	Kalbe Farma Tbk	30	0,6977

17.	2012	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	23	0,5349
18.	2012	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	23	0,5349
19.	2012	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	28	0,6512
20.	2012	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk	32	0,7442
21.	2012	UNTR	United Tractors Tbk	33	0,7674
22.	2012	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	30	0,6977
23.	2013	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	19	0,4419
24.	2013	ASII	Astra International Tbk	27	0,6279
25.	2013	ASRI	Alam Sutera Reality Tbk	16	0,3721
26.	2013	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	27	0,6279
27.	2013	KLBF	Kalbe Farma Tbk	30	0,6977
28.	2013	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	24	0,5581
29.	2013	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	25	0,5814
30.	2013	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	27	0,6279
31.	2013	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk	32	0,7442
32.	2013	UNTR	United Tractors Tbk	33	0,7674
33.	2013	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	32	0,7442
34.	2014	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	19	0,4419

35.	2014	ASII	Astra International Tbk	29	0,6744
36.	2014	ASRI	Alam Sutera Reality Tbk	18	0,4186
37.	2014	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	29	0,6744
38.	2014	KLBF	Kalbe Farma Tbk	32	0,7442
39.	2014	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	25	0,5814
40.	2014	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	26	0,6047
41.	2014	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	29	0,6744
42.	2014	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk	33	0,7674
43.	2014	UNTR	United Tractors Tbk	31	0,7209
44.	2014	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	32	0,7442
45.	2015	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	20	0,4651
46.	2015	ASII	Astra International Tbk	29	0,6744
47.	2015	ASRI	Alam Sutera Reality Tbk	19	0,4419
48.	2015	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	30	0,6977
49.	2015	KLBF	Kalbe Farma Tbk	30	0,6977
50.	2015	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	26	0,6047
51.	2015	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	25	0,5814
52.	2015	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	29	0,6744

53.	2015	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk	34	0,7907
54.	2015	UNTR	United Tractors Tbk	32	0,7442
55.	2015	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	33	0,7674



Lampiran 3. Rangkuman Data Penelitian

No.	Tahun	Kode Emiten	DK	KA	CR	DER	ROA	<i>Disclosure Level</i>
1.	2011	AALI	7	3	1.3097	0.2110	0.2448	0.3953
2.	2011	ASII	11	4	1.3640	0.3865	0.1368	0.7907
3.	2011	ASRI	5	3	5.4409	0.9136	0.1003	0.2791
4.	2011	INTP	7	3	6.9854	0.0598	1.1984	0.4419
5.	2011	KLBF	6	3	3.6527	0.0196	0.1841	0.6744
6.	2011	LPKR	7	3	2.0210	0.4362	0.0446	0.5349
7.	2011	LSIP	9	3	4.8325	0.0721	0.2505	0.4419
8.	2011	SMGR	6	4	2.6465	0.1476	0.2014	0.6047
9.	2011	TLKM	5	6	0.9580	0.3261	0.1501	0.6977
10.	2011	UNTR	6	3	1.7164	0.1457	0.1270	0.7209
11.	2011	UNVR	5	3	0.6867	0.0874	0.3973	0.6512
12.	2012	AALI	7	3	0.6846	0.0485	0.2029	0.4419
13.	2012	ASII	11	4	1.3991	0.4262	0.1248	0.7907
14.	2012	ASRI	5	5	1.2348	0.6449	0.111	0.3488
15.	2012	INTP	7	3	6.0276	0.0473	0.2093	0.5349
16.	2012	KLBF	6	3	3.4054	0.0210	0.1885	0.6977
17.	2012	LPKR	8	3	5.5988	0.8649	0.5032	0.5349
18.	2012	LSIP	9	3	3.2730	0.0764	0.1477	0.5348
19.	2012	SMGR	6	4	1.7059	0.1976	0.1854	0.6512
20.	2012	TLKM	5	6	1.1604	0.3028	0.1649	0.7442
21.	2012	UNTR	6	3	1.9465	0.2066	0.1144	0.7674
22.	2012	UNVR	5	3	0.6683	0.1211	0.4038	0.6977
23.	2013	AALI	7	3	0.4500	0.0912	0.1272	0.4419
24.	2013	ASII	10	4	1.242	0.3453	0.1042	0.6279
25.	2013	ASRI	5	4	0.753	1.0086	0.0617	0.3721
26.	2013	INTP	7	3	6.1281	0.0387	0.1884	0.6279
27.	2013	KLBF	6	3	2.8393	0.0205	0.1741	0.6977
28.	2013	LPKR	8	3	4.9598	0.8662	0.0509	0.5581
29.	2013	LSIP	8	3	2.4852	0.0841	0.0964	0.5814
30.	2013	SMGR	6	4	1.8824	0.1693	0.1739	0.6279
31.	2013	TLKM	6	6	1.1631	0.2853	0.1586	0.7442
32.	2013	UNTR	7	3	1.9102	0.2006	0.0837	0.7674
33.	2013	UNVR	5	3	0.6964	0.1584	0.4010	0.7441

34.	2014	AALI	6	3	0.5847	0.2205	0.1412	0.4419
35.	2014	ASII	11	4	1.3226	0.3506	0.0937	0.6744
36.	2014	ASRI	5	3	1.1373	1.2164	0.0695	0.6512
37.	2014	INTP	7	3	4.9337	0.0339	0.1826	0.6744
38.	2014	KLBF	6	3	3.4036	0.0226	0.1707	0.7442
39.	2014	LPKR	9	3	5.2333	0.8154	0.0830	0.5814
40.	2014	LSIP	8	3	2.4911	0.0953	0.1059	0.6047
41.	2014	SMGR	7	4	2.2090	0.1615	0.1624	0.6744
42.	2014	TLKM	7	5	1.0622	0.2669	0.1522	0.7674
43.	2014	UNTR	7	3	2.0604	0.1404	0.0803	0.7209
44.	2014	UNVR	5	3	0.7149	0.1777	0.4018	0.7442
45.	2015	AALI	5	3	0.7990	0.5378	0.0323	0.4651
46.	2015	ASII	11	4	1.3793	0.3371	0.6360	0.6744
47.	2015	ASRI	5	3	0.7192	1.2654	0.0500	0.4419
48.	2015	INTP	7	3	4.8866	0.0454	0.1576	0.6977
49.	2015	KLBF	7	3	3.6978	0.0359	0.1502	0.6977
50.	2015	LPKR	8	3	6.9133	0.9279	0.0248	0.6047
51.	2015	LSIP	6	3	2.2210	0.1281	0.0704	0.5814
52.	2015	SMGR	7	4	1.5970	0.1499	0.1186	0.6744
53.	2015	TLKM	7	4	1.3529	0.3996	0.1403	0.7907
54.	2015	UNTR	6	3	2.1477	1.1066	0.0452	0.7442
55.	2015	UNVR	5	3	0.6540	0.1606	0.3720	0.7674

Lampiran 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DK	55	5.00	11.00	6.8364	1.6862
KA	55	3.00	6.00	3.4545	.81236
CR	55	.45	6.99	2.4500	1.8286
DER	55	.02	1.27	.3205	.33755
ROA	55	.02	1.20	.1900	.18429
Disclosure Level	55	.28	.79	.6216	.12897
Valid N (listwise)	55				

Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		DK	KA	CR	DER	ROA	Disclosure Level
N		55	55	55	55	55	55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.1936468	-.1470334	-.2419610	-.1061853	-.2598312	.0000000
	Std. Deviation	1.030976	1.0641543	1.0136504	1.1226127	.87885006	1.0000000
Most Extreme Differences	Absolute	.124	.287	.127	.149	.169	.150
	Positive	.124	.287	.127	.149	.169	.100
	Negative	-.084	-.202	-.094	-.134	-.129	-.150
Test Statistic		.124	.287	.127	.149	.169	.150
Asymp. Sig. (2-tailed)		.133 ^c	.120 ^c	.127 ^c	.138 ^c	.144 ^c	.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

2. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.237	.092		2.577	.013		
DK	-.067	.122	-.069	-.546	.587	.486	2.059
KA	.317	.105	.338	3.026	.004	.621	1.611
CR	.306	.116	.310	2.626	.011	.555	1.802
DER	-.098	.091	-.110	-1.078	.286	.740	1.352
ROA	.536	.127	.471	4.217	.000	.619	1.615

a. Dependent Variable: Disclosure Level

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.535	.110		4.865	.000
	DK	.010	.010	.127	.948	.348
	KA	.027	.022	.170	1.221	.228
	CR	-.010	.010	-.146	-1.002	.321
	DER	-.117	.052	-.305	-1.241	.296
	ROA	-.054	.097	-.078	-.560	.578

a. Dependent Variable: RES2

4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.788 ^a	.621	.583	.64598442	1.937

a. Predictors: (Constant), ROA, DER, CR, KA, DK

b. Dependent Variable: Disclosure Level

Lampiran 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.788 ^a	.621	.583	.64598442	1.937

a. Predictors: (Constant), ROA, DER, CR, KA, DK

b. Dependent Variable: Disclosure Level

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.553	5	6.711	16.081	.000 ^b
	Residual	20.447	49	.417		
	Total	54.000	54			

a. Dependent Variable: Disclosure Level

b. Predictors: (Constant), ROA, DER, CR, KA ,DK

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.237	.092		2.577	.013
	DK	-.067	.122	-.069	-.546	.587
	KA	.317	.105	.338	3.026	.004
	CR	.306	.116	.310	2.626	.011
	DER	-.098	.091	-.110	-1.078	.286
	ROA	.536	.127	.471	4.217	.000

a. Dependent Variable: Disclosure Level

Lampiran 7. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Adjusted R² (Koefisien Determinasi)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	.621	.583	.64598442

a. Predictors: (Constant), ROA, DER, CR, KA, DK

b. Dependent Variable: Disclosure Level

2. Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.553	5	6.711	16.081	.000 ^b
	Residual	20.447	49	.417		
	Total	54.000	54			

a. Dependent Variable: Disclosure Level

b. Predictors: (Constant), ROA, DER, CR, KA, DK

3. Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.237	.092		2.577	.013
	DK	-.067	.122	-.069	-.546	.587
	KA	.317	.105	.338	3.026	.004
	CR	.306	.116	.310	2.626	.011
	DER	-.098	.091	-.110	-1.078	.286
	ROA	.536	.127	.471	4.217	.000

a. Dependent Variable: Disclosure Level

Lampiran 8. Durbin Watson (DW) Tabel

Durbin-Watson Statistic: 5 Per Cent Significance Points of dL and dU

n	k'=1		k'=2		k'=3		k'=4		k'=5		k'=6		k'=7		k'=8		k'=9		k'=10	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.610	1.400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	0.700	1.356	0.467	1.896	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	0.763	1.332	0.559	1.777	0.367	2.287	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	0.824	1.320	0.629	1.699	0.455	2.128	0.296	2.588	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	0.879	1.320	0.697	1.641	0.525	2.016	0.376	2.414	0.243	2.822	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	0.927	1.324	0.758	1.604	0.595	1.928	0.444	2.283	0.315	2.645	0.203	3.004	---	---	---	---	---	---	---	---
12	0.971	1.331	0.812	1.579	0.658	1.864	0.512	2.177	0.380	2.506	0.268	2.832	0.171	3.149	---	---	---	---	---	---
13	1.010	1.340	0.861	1.562	0.715	1.816	0.574	2.094	0.444	2.390	0.328	2.692	0.230	2.985	0.147	3.266	---	---	---	---
14	1.045	1.350	0.905	1.551	0.767	1.779	0.632	2.030	0.505	2.296	0.389	2.572	0.286	2.848	0.200	3.111	0.127	3.360	---	---
15	1.077	1.361	0.946	1.543	0.814	1.750	0.685	1.977	0.562	2.220	0.447	2.471	0.343	2.727	0.251	2.979	0.175	3.216	0.111	3.438
16	1.106	1.371	0.982	1.539	0.857	1.728	0.734	1.935	0.615	2.157	0.502	2.388	0.398	2.624	0.304	2.860	0.222	3.090	0.155	3.304
17	1.133	1.381	1.015	1.536	0.897	1.710	0.779	1.900	0.664	2.104	0.554	2.318	0.451	2.537	0.356	2.757	0.272	2.975	0.198	3.184
18	1.158	1.391	1.046	1.535	0.933	1.696	0.820	1.872	0.710	2.060	0.603	2.258	0.502	2.461	0.407	2.668	0.321	2.873	0.244	3.073
19	1.180	1.401	1.074	1.536	0.967	1.685	0.859	1.848	0.752	2.023	0.649	2.206	0.549	2.396	0.456	2.589	0.369	2.783	0.290	2.974
20	1.201	1.411	1.100	1.537	0.998	1.676	0.894	1.828	0.792	1.991	0.691	2.162	0.595	2.339	0.502	2.521	0.416	2.704	0.336	2.885
21	1.221	1.420	1.125	1.538	1.026	1.669	0.927	1.812	0.829	1.964	0.731	2.124	0.637	2.290	0.546	2.461	0.461	2.633	0.380	2.806
22	1.239	1.429	1.147	1.541	1.053	1.664	0.958	1.797	0.863	1.940	0.769	2.090	0.677	2.246	0.588	2.407	0.504	2.571	0.424	2.735
23	1.257	1.437	1.168	1.543	1.078	1.660	0.986	1.785	0.895	1.920	0.804	2.061	0.715	2.208	0.628	2.360	0.545	2.514	0.465	2.670
24	1.273	1.446	1.188	1.546	1.101	1.656	1.013	1.775	0.925	1.902	0.837	2.035	0.750	2.174	0.666	2.318	0.584	2.464	0.506	2.613
25	1.288	1.454	1.206	1.550	1.123	1.654	1.038	1.767	0.953	1.886	0.868	2.013	0.784	2.144	0.702	2.280	0.621	2.419	0.544	2.560
26	1.302	1.461	1.224	1.553	1.143	1.652	1.062	1.759	0.979	1.873	0.897	1.992	0.816	2.117	0.735	2.246	0.657	2.379	0.581	2.513
27	1.316	1.469	1.240	1.556	1.162	1.651	1.084	1.753	1.004	1.861	0.925	1.974	0.845	2.093	0.767	2.216	0.691	2.342	0.616	2.470
28	1.328	1.476	1.255	1.560	1.181	1.650	1.104	1.747	1.028	1.850	0.951	1.959	0.874	2.071	0.798	2.188	0.723	2.309	0.649	2.431
29	1.341	1.483	1.270	1.563	1.198	1.650	1.124	1.743	1.050	1.841	0.975	1.944	0.900	2.052	0.826	2.164	0.753	2.278	0.681	2.396
30	1.352	1.489	1.284	1.567	1.214	1.650	1.143	1.739	1.071	1.833	0.998	1.931	0.926	2.034	0.854	2.141	0.782	2.251	0.712	2.363
31	1.363	1.496	1.297	1.570	1.229	1.650	1.160	1.735	1.090	1.825	1.020	1.920	0.950	2.018	0.879	2.120	0.810	2.226	0.741	2.333
32	1.373	1.502	1.309	1.574	1.244	1.650	1.177	1.732	1.109	1.819	1.041	1.909	0.972	2.004	0.904	2.102	0.836	2.203	0.769	2.306
33	1.383	1.508	1.321	1.577	1.258	1.651	1.193	1.730	1.127	1.813	1.061	1.900	0.994	1.991	0.927	2.085	0.861	2.181	0.796	2.281
34	1.393	1.514	1.333	1.580	1.271	1.652	1.208	1.728	1.144	1.808	1.079	1.891	1.015	1.978	0.950	2.069	0.885	2.162	0.821	2.257
35	1.402	1.519	1.343	1.584	1.283	1.653	1.222	1.726	1.160	1.803	1.097	1.884	1.034	1.967	0.971	2.054	0.908	2.144	0.845	2.236
36	1.411	1.525	1.354	1.587	1.295	1.654	1.236	1.724	1.175	1.799	1.114	1.876	1.053	1.957	0.991	2.041	0.930	2.127	0.868	2.216
37	1.419	1.530	1.364	1.590	1.307	1.655	1.249	1.723	1.190	1.795	1.131	1.870	1.071	1.948	1.011	2.029	0.951	2.112	0.891	2.197
38	1.427	1.535	1.373	1.594	1.318	1.656	1.261	1.722	1.204	1.792	1.146	1.864	1.088	1.939	1.029	2.017	0.970	2.098	0.912	2.180
39	1.435	1.540	1.382	1.597	1.328	1.658	1.273	1.722	1.218	1.789	1.161	1.859	1.104	1.932	1.047	2.007	0.990	2.085	0.932	2.164
40	1.442	1.544	1.391	1.600	1.338	1.659	1.285	1.721	1.230	1.786	1.175	1.854	1.120	1.924	1.064	1.997	1.008	2.072	0.952	2.149
45	1.475	1.566	1.430	1.615	1.383	1.666	1.336	1.720	1.287	1.776	1.238	1.835	1.189	1.895	1.139	1.958	1.089	2.022	1.038	2.088
50	1.503	1.585	1.462	1.628	1.421	1.674	1.378	1.721	1.335	1.771	1.291	1.822	1.246	1.875	1.201	1.930	1.156	1.986	1.110	2.044
55	1.528	1.601	1.490	1.641	1.452	1.681	1.414	1.724	1.374	1.768	1.334	1.814	1.294	1.861	1.253	1.909	1.212	1.959	1.170	2.010
60	1.549	1.616	1.514	1.652	1.480	1.689	1.444	1.727	1.408	1.767	1.372	1.808	1.335	1.850	1.298	1.894	1.260	1.939	1.222	1.994
65	1.567	1.629	1.536	1.662	1.503	1.696	1.471	1.731	1.438	1.767	1.404	1.805	1.370	1.843	1.336	1.882	1.301	1.923	1.266	1.964
70	1.583	1.641	1.554	1.672	1.525	1.703	1.494	1.735	1.464	1.768	1.433	1.802	1.401	1.838	1.369	1.874	1.337	1.910	1.305	1.948

Lampiran 9. F Tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82

Lampiran 10. t Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446